

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT FIRST MEDIA TBK. DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT First Media Tbk.
("Perseroan")**

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Telekomunikasi dan penyediaan konten

Kantor Pusat:

Gedung BeritaSatu Plaza, Lantai 4, Suite 401
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 – 36, Jakarta 12950

Telepon: (021) 5278811

Faksimili: (021) 5278833

Website: www.firstmedia.co.id

Email: corporate.secretary@firstmedia.com

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui Rencana Transaksi akan diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2022.

DEFINISI

Afiliasi : Afiliasi adalah: (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan

komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

- AI : Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Malaysia dan berkedudukan di Malaysia.
- AGB : Axiata Group Berhad, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Malaysia dan berkedudukan di Malaysia.
- ALD : Asia Link Dewa Pte. Ltd., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Singapura dan berkedudukan di Singapura.
- FMTV : PT First Media Television, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
- ISOL : PT Infra Solusi Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Keterbukaan Informasi : Keterbukaan Informasi ini yang memuat informasi-informasi terkait dengan Rencana Transaksi yang disiapkan dalam kerangka memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).
- KJPP : Kantor Jasa Penilaian Publik Doli Siregar & Rekan selaku penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang ditunjuk oleh Perseroan.
- Laporan Keuangan : Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021.
- LINK : PT Link Net Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
- LNGS : Link Net Global Solution Pte Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Singapura dan berkedudukan di Singapura.
- Objek Transaksi : 798.969.286 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam) saham dalam LINK yang dimiliki

oleh Perseroan yang mewakili 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam LINK (di luar saham *treasury*).

- OJK : Otoritas Jasa Keuangan, berarti lembaga yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21/2011”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21/2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- POJK No. 15/2020 : Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- POJK No. 17/2020 : Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 42/2020 : Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 35/2020 : Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
- Pengendali : Pengendali Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yaitu pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: (a) memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.
- Pemegang Saham Independen : Pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan: (a) bukan merupakan anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau (b) bukan merupakan Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali.
- Perseroan : PT First Media Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Juni 2022 atau pada tanggal lain sebagaimana akan diberitahukan kemudian oleh Perseroan.
Transaksi Afiliasi	:	Memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
Transaksi Benturan Kepentingan	:	Memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.
Transaksi Material	:	Memiliki arti sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020.
XL	:	PT XL Axiata Tbk.

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penjualan dan pengalihan kepada AII dan XL atas seluruh kepemilikan Perseroan di LINK sejumlah 798.969.286 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam) saham yang mewakili 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam LINK (di luar saham *treasury*) ("**Rencana Transaksi**") dengan total nilai transaksi sebesar Rp3.835.052.572.800 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).

Bahwa bersamaan dengan Rencana Transaksi, ALD juga berencana untuk melakukan penjualan dan pengalihan kepada AII dan XL atas seluruh kepemilikan ALD di LINK sejumlah 1.017.766.198 (satu miliar tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan) saham yang mewakili 36,99% (tiga puluh enam koma sembilan sembilan persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam LINK (di luar saham *treasury*).

Bahwa saham-saham dimiliki oleh Perseroan dan ALD tersebut seluruhnya berjumlah 1.816.735.484 (satu miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat) saham yang mewakili 66,03% (enam puluh enam koma nol tiga persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam LINK (di luar saham *treasury*).

Bahwa Rencana Transaksi merupakan suatu Transaksi Material yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) huruf d angka 1 POJK No. 17/2020, dimana nilai dari Rencana Transaksi lebih dari 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan. Lebih lanjut, mengingat Perseroan telah mencatatkan kerugian operasional yang berkelanjutan sejak tahun 2018 dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 butir c POJK No. 17/2020, maka pelaksanaan Rencana Transaksi perlu untuk memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan.

Bahwa Rencana Transaksi bukan merupakan Transaksi Afiliasi maupun Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, di mana tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan XL dan AII sebagai pembeli serta tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis antara Perseroan dengan pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, pemegang saham utama, maupun Pengendali yang dapat merugikan Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya POJK No. 17/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada pemegang saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga pemegang saham Perseroan, khususnya Pemegang Saham Independen, dapat mempertimbangkan untuk memberikan persetujuannya dalam RUPS.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL

A. Objek Transaksi

798.969.286 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam) saham dalam LINK yang dimiliki oleh Perseroan yang mewakili 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam LINK (di luar saham *treasury*).

B. Nilai Transaksi

Nilai dari Rencana Transaksi yang akan diterima oleh Perseroan Rp3.835.052.572.800 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) dari penjualan dan pengalihan atas 798.969.286 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam) saham yang mewakili 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam LINK sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada bagian C di bawah ini. Nilai dari Rencana Transaksi yang akan diterima oleh Perseroan mencapai 12.618,63% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan, yang mana berdasarkan POJK No. 17/2020 merupakan Transaksi Material yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

C. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan, ALD, AII dan XL telah menandatangani *Share Purchase Agreement* pada tanggal 27 Januari 2022 (“SPA”) sebagaimana telah disampaikan oleh Perseroan melalui surat Perseroan nomor SB-005/FM-CSL/OJK/I/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Laporan Informasi atau Fakta Material.

Berikut informasi mengenai beberapa ketentuan dalam SPA:

Para Pihak	:	i. Perseroan; ii. ALD (bersama-sama dengan Perseroan, disebut sebagai “ Para Penjual ”); iii. XL; dan
------------	---	--

		iv. AII (bersama-sama dengan XL, disebut sebagai "Para Pembeli").
Objek	:	Penjualan dan pengalihan atas 1.816.735.484 (satu miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat) saham dalam LINK yang masing-masing dimiliki oleh Perseroan dan ALD sebesar: (i) 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat persen); dan (ii) 36,99% (tiga puluh enam koma sembilan sembilan persen); yang seluruhnya mewakili 66,03% (enam puluh enam koma nol tiga persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam LINK (di luar saham <i>treasury</i>), sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam SPA.
Harga Jual Beli	:	<p>Rp 8.720.330.323.200,00 (delapan triliun tujuh ratus dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) ("Harga Penjualan").</p> <p>Jumlah yang akan diterima oleh Perseroan adalah sebesar 43,98% (empat puluh tiga koma sembilan delapan persen) dari Harga Penjualan yakni sebesar Rp3.835.052.572.800 (tiga triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus Rupiah).</p> <p>Jumlah yang akan diterima oleh ALD adalah sebesar 56,02% (lima puluh enam koma nol dua persen) dari Harga Penjualan yakni sebesar Rp4.885.277.750.400 (empat triliun delapan ratus delapan puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus Rupiah).</p>
Persyaratan Pendahuluan	:	<p>Persyaratan pendahuluan dalam SPA yang harus dipenuhi sebelum Rencana Transaksi dapat diselesaikan antara lain adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. diperolehnya persetujuan pemegang saham AGB, untuk menyetujui Rencana Transaksi; ii. diperolehnya persetujuan pemegang saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi; dan iii. tidak terdapat surat keputusan, penetapan, putusan atau perintah lain (yang bersifat final dan tidak dapat diajukan banding) yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang berwenang atau OJK yang memiliki dampak menahan atau dengan cara

		lain melarang Rencana Transaksi dan yang tetap berlaku pada Tanggal Penyelesaian. <u>Keterangan:</u> “Tanggal Penyelesaian” adalah tanggal dimana selesainya pelaksanaan Rencana Transaksi.
Pernyataan dan Jaminan Penjual	:	Penjual menyatakan dan menjamin, antara lain: i. Penjual adalah badan hukum yang sah didirikan berdasarkan hukum negaranya masing-masing; ii. Penjual berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban berdasarkan SPA; iii. Penjual adalah pemilik sah atas Objek Transaksi; iv. tidak ada tuntutan, gugatan, maupun perintah pengadilan yang melarang pelaksanaan SPA; v. Laporan keuangan audit LINK untuk tahun buku 2020 dan semester 1 tahun buku 2021 telah disajikan sesuai PSAK dan menggambarkan kondisi keuangan LINK yang sebenarnya.
Kewajiban Penjual	:	Sampai dengan Tanggal Penyelesaian, Perseroan dan ALD selaku Penjual berkewajiban untuk menjamin antara lain: i. LINK wajib menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana mestinya; ii. LINK tidak melakukan perubahan anggaran dasar atau menandatangani perjanjian apapun yang membatasi LINK menjalankan kegiatan usahanya; iii. LINK tidak akan melakukan penggabungan, pemisahan, atau reorganisasi; iv. LINK tidak akan melakukan akuisisi bisnis maupun aset, kecuali dalam rangka kegiatan usahanya; v. LINK tidak akan melakukan perubahan terhadap perjanjian penting yang berdampak merugikan bagi LINK.
Hukum yang Mengatur	:	Hukum Negara Singapura.
Penyelesaian Sengketa	:	<i>Singapore International Arbitration Centre</i>

D. Keterangan Mengenai Para Pihak dalam Rencana Transaksi

1. Perseroan Selaku Penjual

Riwayat Singkat

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT Safira Ananda, didirikan berdasarkan Akta No. 37 tanggal 6 Januari 1994 yang dibuat di hadapan Siti Safariyah, S.H., selaku pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notaris di Jakarta. Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-1.446 HT.01.01.Th.95 tanggal 1 Pebruari 1995, telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 549/III/1995 tanggal 30 Maret 1995, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1999, Tambahan No. 6613/1999.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 15 tanggal 25 Juni 2021, dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang memuat antara lain persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 9 (tentang Rapat Umum Pemegang Saham), Pasal 10 (tentang Tempat, Pengumuman dan Pemanggilan RUPS), Pasal 11 (tentang Hak Pemegang Saham, kehadiran Pihak lain dalam RUPS dan Pimpinan RUPS), Pasal 12 (tentang Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS) dan Pasal 13 (tentang Risalah RUPS dan Ringakasan risalah RUPS) Anggaran Dasar Perseroan. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0430925 tanggal 23 Juli 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0127702.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 ("**Akta No. 15/2021**").

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah menjalankan usaha-usaha di bidang telekomunikasi dan penyediaan konten.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 15/2021, yaitu sebagai berikut:

- (1) Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang telekomunikasi, baik melalui kabel, tanpa kabel, maupun satelit, serta penyediaan konten, baik konten video dan program siaran televisi dan radio, maupun konten melalui jaringan bergerak seluler dan/atau jaringan tetap lokal tanpa kabel.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Mengoperasikan, memelihara atau menyediakan akses pada fasilitas untuk telekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi, baik berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi, baik melalui kabel, tanpa kabel, maupun satelit, baik jaringan tetap

- maupun bergerak, antara lain: jaringan tetap lokal, jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh dan sambungan internasional, jaringan tetap tertutup, jaringan bergerak terrestrial, selular, satelit dan pengembangannya;
- ii. Menyediakan jasa telekomunikasi menggunakan kapasitas jaringan telekomunikasi, baik berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi, baik melalui kabel, tanpa kabel, maupun satelit, termasuk jasa teleponi dasar, jasa nilai tambah teleponi, jasa multimedia antara lain: jasa telepon, faksimili, telex, telegraf, akses internet, jasa interkoneksi internet (*network access point/NAP*), jasa internet teleponi, baik untuk publik, usaha, maupun rumah tangga, termasuk pengembangannya; dan
 - iii. Penyedia konten, baik produksi, aggregator, maupun distribusi konten, antara lain konten informasi, hiburan, multimedia, siaran televisi dan radion, aplikasi (software) dan online video streaming, baik langsung maupun suara online.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan 5% atau lebih per tanggal 31 Maret 2022 yang diterbitkan oleh PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp500,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.967.587.600	3.483.793.800.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Reksa Puspita Karya	588.167.378	294,083,689,000	33,76
- PT Trijaya Putra Mulia	476.772.713	238.386.356.500	27,37
- PT Ciptadana Capital	342.564.386	171.282.193.000	19,66
- Masyarakat	334.663.430	167.331.715.000	19,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.742.167.907	871.083.953.500	100
Jumlah Saham dalam Portepel	5.225.419.693	2.612.709.846.500	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT First Media Tbk No. 14 tanggal 25 Juni 2021, dibuat di hadapan Andalia Farida, S.H., M.H. Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-043095 tanggal 23 Juli 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0127135.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Juli

2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Ir. Harianda Noerlan
 Direktur : H. RM. Hernowo Hadiprodjo, S.H., M.B.A.
 Direktur : Johannes Tong
 Direktur : Budi Erawanto

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Drs. H. R. Soeparmadi
 Komisaris Independen : Drs. Teguh Pudjowigoro
 Komisaris Independen : Widjaya Hambali
 Komisaris : Lim Benni

Posisi Keuangan Perseroan

Ringkasan posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

POSISI KEUANGAN	31 Desember 2019	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Aset			
Aset lancar	344.763	133.685	142.582
Aset tidak lancar	6.829.732	6.472.362	4.442.640
Jumlah Aset	7.174.495	6.606.047	4.585.222
Liabilitas dan ekuitas			
Liabilitas jangka pendek	4.069.059	4.920.800	4.404.354
Liabilitas jangka panjang	2.159.695	759.426	150.476
Jumlah liabilitas	6.228.754	5.680.226	4.554.830
Ekuitas	945.741	925.821	30.392
Jumlah liabilitas dan ekuitas	7.174.495	6.606.047	4.585.222

(dalam Jutaan Rupiah)

LAPORAN LABA RUGI	31 Desember 2019	31 Desember 2020	31 Desember 2021
Penjualan Bersih	248.909	188.697	151.800
(Beban) Pokok Penjualan	(144.562)	(103.529)	(86.935)
Laba Kotor	104.347	85.168	64.865
Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(345.368)	(81.155)	(1.330.162)
Laba (Rugi) sebelum pajak penghasilan	(241.021)	4.013	(1.265.297)
Laba (Rugi) tahun berjalan	(256.057)	(21.478)	(1.265.864)

2. ALD selaku Penjual

Riwayat Singkat

ALD adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Singapura dan berdomisili di Singapura (Pendaftaran Perusahaan No. 201108211K) pada tanggal 5 April 2011 berdasarkan *Memorandum and Articles of Association* ALD yang telah memperoleh *Certificate of Confirming Incorporation of Company* tertanggal 6 April 2011 dari *Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)* Singapura. Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, ALD tidak mengalami perubahan Anggaran Dasar.

ALD berkantor di 77 Robinson Road #06-03, Robinson 77, Singapore 068896 dengan Nomor Fax: (65) – 65007323 dan Nomor Telepon: (65) – 65007328.

Kegiatan Usaha

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, maksud dan tujuan ALD adalah sebagai perusahaan induk dari perusahaan investasi.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh ALD saat ini adalah melakukan aktivitas investasi di LINK dan FMTV.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam ALD adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp10.000 per saham		
	Jenis Saham	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Penuh			
Asia Link Company Limited (ALC)	Biasa	10.000.000	100.000.000.000
Asia Link Company Limited (ALC)	Preferen	138.151.537	1.381.515.370.000

Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, kepengurusan ALD adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Tan Ting Luen
Direktur : Sigit Prasetya
Direktur : Richard Kidarsa
Direktur : Minki Brian Hong (Direktur Pengganti Sigit Prasetya)

3. **XL selaku Pembeli**

Riwayat Singkat

XL, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 6 Oktober 1989 dan diubah dengan Akta No. 79 tanggal 17 Januari 1991, keduanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso Notaris di Jakarta, yang telah disetujui berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-515.HT.01.01.Th.91 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 8 November 1991, Tambahan No. 4070.

Anggaran Dasar XL telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 23 April 2021 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0027862.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada daftar Perseroan No. AHU-00844321.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021.

XL beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia dengan kode saham "EXCL".

Pada saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh XL adalah menjalankan usaha-usaha di bidang telekomunikasi, perantara moneter lainnya, *wholesale*, kegiatan pemrograman dan konsultasi komputer, kegiatan konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer, kegiatan layanan informasi, dan kegiatan konsultasi manajemen lainnya.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha XL adalah sebagaimana Pasal 3 Anggaran Dasar yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 51 tanggal 23 April 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0027862.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-00844321.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021:

- (1) Maksud dan Tujuan XL adalah melakukan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan telekomunikasi, aktivitas pemograman, dan konsultasi komputer, aktivitas jasa informasi, perdagangan besar, aktivitas konsultasi manajemen, dan aktivitas keuangan.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, XL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Kegiatan usaha telekomunikasi:
 - i. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Aktivitas Telekomunikasi Dengan kabel;
 - Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel.
 - ii. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - Internet Service Provider;

- Jasa Sistem Komunikasi (Jasa Sistem Komunikasi Data);
 - Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
 - Jasa Interkoneksi Internet (NAP);
 - Jasa Penyedia Konten Melalui Jaringan Bergerak Seluler atau Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel Dengan Mobilitas Terbatas (Jasa Konten SMS Premium);
 - Jasa Multimedia Lainnya.
- b. Perantara Moneter lainnya.
- c. Perdagangan Besar:
- i. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer;
 - ii. Perdagangan Besar Piranti Lunak;
 - iii. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.
- d. Aktivitas pemrograman, konsultasi Komputer, dan kegiatan yang berkaitan dengan itu:
- i. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.
- e. Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer:
- i. Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi;
 - ii. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
 - iii. Aktivitas Konsultasi dan Perancangan Internet of Things;
- f. Aktivitas jasa informasi:
- i. Aktivitas Pengolahan Data;
 - ii. Aktivitas Hosting dan yang berkaitan dengan itu;
 - iii. Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial;
 - iv. Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial.
- g. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
- (3) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas serta untuk menunjang kegiatan usaha utama XL tersebut di atas, XL dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
- a. Merencanakan, merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, dan mengoperasikan, menyewakan, memelihara, serta pengadaan sarana/fasilitas telekomunikasi termasuk pengadaan sumber daya untuk mendukung usaha Perseroan dalam penyelenggaraan jasa dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - b. Meningkatkan semaksimal mungkin usaha penyelenggaraan jasa dan jaringan telekomunikasi dimaksud, sehingga mencapai kapasitas yang diinginkan dan dibutuhkan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas;
 - c. Menjalankan usaha dan kegiatan pengoperasian (yang meliputi juga pemasaran serta penjualan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan Perseroan), melakukan pemeliharaan, penelitian, pengembangan, sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi, penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan non-formal dalam bidang telekomunikasi baik di dalam maupun di luar negeri;
 - d. Menyelenggarakan jasa dan jaringan telekomunikasi lainnya termasuk jasa dan/atau jaringan teknologi informasi; dan
 - e. Menyelenggarakan kegiatan lain yang dianggap perlu untuk mendukung dan/atau terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi, aktivitas pemrograman, dan konsultasi komputer,

aktivitas jasa informasi, aktivitas perdagangan besar, aktivitas konsultasi manajemen, dan aktivitas keuangan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham XL yang mencapai 5% atau lebih per tanggal 31 Maret 2022 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek XL, struktur permodalan dan susunan pemegang saham XL adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,00 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	22.650.000.000	2.265.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	6.559.247.263	655.924.726.300	61,16
- Masyarakat	4.108.939.713	410.893.971.300	38,31
- Saham Treasury	56.487.800	5.648.780.000	0,53
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.724.674.776	1.072.467.477.600	100
Jumlah Saham dalam Portepel	11.925.325.224	1.192.532.522.400	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 50 tanggal 23 April 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT XL AXIATA Tbk. No. AHU-AH.01.03-0289683 tanggal 5 Mei 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0083195.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Mei 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris XL adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Dian Siswarini
Direktur	:	Yessie D. Yosetya
Direktur	:	Abhijit Jayant Navalekar
Direktur	:	David Arcelus Oses
Direktur	:	Budi Pramantika
Direktur	:	I Gede Darmayusa

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Muhamad Chatib Basri
Komisaris	:	Vivek Sood
Komisaris	:	David Robert Dean
Komisaris Independen	:	Yasmin Stamboel Wirjawan
Komisaris Independen	:	Muliadi Rahardja
Komisaris Independen	:	Julianto Sidarto

Komisaris : Dato' Mohd Izzadin Idris
Komisaris : Doktorandus Hans Wijayasuriya

4. AII selaku Pembeli

Riwayat Singkat

AII, berkedudukan di Malaysia didirikan berdasarkan Nomor Registrasi 199501035534 (364736-V) tanggal 25 Oktober 1995, dengan nama Nynex Indocel Holding Sdn., yang memperoleh status sebagai perusahaan dengan saham Pribadi terbatas pada tanggal 27 Maret 2005 dan melakukan perubahan nama menjadi AII pada 6 Juli 2010.

Kegiatan Usaha

AII didirikan untuk tujuan mengambil bagian dan memegang kepemilikan saham dalam PT Excelcomindo (saat ini XL) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Modal Ditempatkan : RM100.000
Jumlah Saham : 100.000 Saham Biasa

Nama Pemegang Saham	Nominal Modal	%
- Axiata Investments (Labuan) Sdn. Bhd.	RM100.000	100%

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur : Suryani Binti Hussein
Direktur : Tan Gim Boon
Direktur : Vivek Sood

E. Keterangan Mengenai Objek Transaksi

LINK

Riwayat Singkat

LINK pertama kali didirikan dengan nama "PT Seruling Indah Permai" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Seruling Indah Permai No. 93, tanggal 14 Maret 1996, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 304 tanggal 26 Juli 1996, dibuat di hadapan Yuliandi Ermawanto, S.H., pengganti Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-8324 HT.01.01.Th.96, tanggal 7 Agustus 1996.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 13 tanggal 19 Juli 2021, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0429788 tanggal 19 Juli 2021 (“**Akta 13/2021**”). LINK mengubah alamat perusahaan berdasarkan akta nomor 11 tanggal 11 Oktober 2021 oleh Notaris Rini Yulianti, S.H., notaris di Jakarta. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0459106 tanggal 11 Oktober 2021.

Pada saat ini, kegiatan usaha yang dijalankan oleh LINK saat ini adalah menjalankan usaha di bidang penyelenggaraan jaringan tetap berbasis kabel, jasa multimedia, jasa akses internet, serta jasa konsultasi manajemen bisnis.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha LINK adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 13/2021, yaitu sebagai berikut:

- Maksud dan Tujuan LINK ialah berusaha dalam bidang penyelenggaraan aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* (jasa akses internet), jasa sistem komunikasi, jasa interkoneksi internet (NAP), jasa multimedia lainnya, aktivitas telekomunikasi tanpa kabel, aktivitas telekomunikasi satelit, jasa nilai tambah teleponi lainnya, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP), aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas *call centre*, perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar peralatan telekomunikasi, perdagangan besar berbagai macam barang, instalasi telekomunikasi, aktivitas pemrograman komputer lainnya, aktivitas konsultasi komputer, dan manajemen fasilitas komputer lainnya, dan aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, LINK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama, yaitu:

- i. Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel, mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur telekomunikasi kabel, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan perlengkapan telegraf dan komunikasi non vokal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator dari jaringan dan penyediaan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet oleh operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa.

- Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti *Public Switched Telephone Network* (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum;
- ii. *Internet Service Provider* (Jasa Akses Internet), mencakup usaha jasa pelayanan yang ditawarkan suatu perusahaan kepada pelanggannya untuk mengakses internet, atau bisa disebut sebagai pintu gerbang ke internet;
 - iii. Jasa Sistem Komunikasi, mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi, seperti jasa VSAT (*Very Small Aperture Terminal*). VSAT adalah suatu sistem yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Yang menggunakan fasilitas VSAT adalah RPUU, Radio Trunking, STBS, dan lainnya;
 - iv. Jasa Interkoneksi Internet (NAP), mencakup kegiatan menyelenggarakan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet. Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringanh untuk transmisi internet. Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi. Penyelenggara jasa interkoneksi melakukan pengaturan trafik penyelenggaraan jasa akses internet; dan
 - v. Jasa Multimedia Lainnya, mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok *internet service provider* (jasa akses internet), jasa sistem komunikasi, jasa internet teleponi untuk keperluan publik (ITKP) dan jasa interkoneksi internet (NAP).

Kegiatan Usaha Penunjang, yaitu:

- i. Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel, mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (paging), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel;
- ii. Aktivitas Telekomunikasi Satelit, mencakup mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit Stasiun bumi, Sentral gerbang dan Jaringan penghubung. Kegiatan pada kelompok ini mencakup pengoperasian, perawatan atau penyediaan akses terhadap fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks dan video menggunakan infrastruktur telekomunikasi satelit, pengiriman

- audio visual atau program teks yang diterima dari jaringan kabel, stasiun televisi lokal atau jaringan radio ke konsumen melalui sistem satelit yang langsung terhubung ke rumah (unit yang diklasifikasikan di sini umumnya tidak berasal dari materi pemrograman). Termasuk kegiatan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur satelit;
- iii. Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya, mencakup kegiatan lainnya jasa nilai tambah teleponi seperti kartu panggil, dan termasuk jasa penunjang telekomunikasi lainnya;
 - iv. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP), mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi;
 - v. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.;
 - vi. Aktivitas Call Centre, cakup usaha jasa call center, seperti Inbound Call Centre (panggilan ke dalam), menjawab panggilan dari pelanggan oleh operator manusia, distribusi panggilan otomatis, integrasi telepon dan komputer, sistem respon suara interaktif atau metode yang sejenis untuk menerima permintaan, menyediakan produk informasi yang berkaitan dengan permintaan bantuan pelanggan atau menyalurkan keluhan atau komplain dari pelanggan; Outbond Call Centre (panggilan ke luar), menggunakan metode yang sejenis untuk menjual atau memasarkan barang atau jasa kepada pelanggan potensial, melakukan penelitian pasar atau jajak pendapat masyarakat dan kegiatan yang sejenis kepada pelanggan.;
 - vii. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak, mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu,

- alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454;
- viii. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer, mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer;
 - ix. Perdagangan Besar Piranti Lunak, mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak;
 - x. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, mencakup mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi;
 - xi. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang, mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu);
 - xii. Instalasi Telekomunikasi, mencakup mencakup kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena. Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan sejenisnya. Termasuk kegiatan pemasangan transmisi dan jaringan telekomunikasi;
 - xiii. Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62012). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413;
 - xiv. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar

yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait. Kegiatan sejenis yang dilakukan oleh unit penjualan perusahaan komputer dimasukkan didalam kelompok 47411; dan

- xv. Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya, mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham LINK yang mencapai 5% atau lebih per tanggal 31 Maret 2022 yang diterbitkan oleh PT Sharestar Indonesia, selaku Biro Administrasi Efek LINK, struktur permodalan dan susunan pemegang saham LINK adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	8.040.000.000	804.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT First Media Tbk.	798.969.286	79.896.928.600	27,90
- Asia Link Dewa Pte. Ltd.	1.017.766.198	101.776.619.800	35,55
- Masyarakat	934.845.500	93.484.550.000	32,65
- Saham Treasury	111.614.500	11.161.450.000	3,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.863.195.484	286.319.548.400	100
Jumlah Saham dalam Portepel	5.176.804.516	517.680.451.600	100

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tanggal 12 Juni 2020, dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0249051 tanggal 16 Juni 2020 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0094335.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 16 Juni 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris LINK adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Marlo Budiman
Direktur	:	Henry Jani Liando
Direktur	:	Wonbae Lee
Direktur	:	Andy Nugroho Purwohardono
Direktur	:	Victor Indajang

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris (Independen)	:	Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen	:	Alexander S Rusli
Komisaris	:	Edward Daniel Horowitz
Komisaris	:	Sigit Prasetya
Komisaris	:	Suvir Varma

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI SERTA DAMPAK TRANSAKSI

Pertumbuhan industri digital kian memberikan harapan besar bagi Indonesia. Tahun 2019, nilai ekonomi digital di Indonesia mencapai US\$40 miliar atau setara Rp560 triliun. Jumlah transaksi perdagangan online setiap bulannya mencapai Rp13 triliun. Dari total belanja daring senilai US\$8 miliar di 2017, meningkat menjadi US\$55 miliar hingga US\$65 miliar pada 2020. Jika berbicara mengenai prospek usaha kedepan, berbagai pakar sudah meyakini industri digital akan menjadi lanskap baru dalam dunia bisnis. Pertumbuhan industri digital sangat eksponensial setiap tahunnya di Indonesia, apalagi di tengah Pandemi Covid-19 gaya hidup masyarakat telah berubah total dan beralih ke sarana digital dalam kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan industri digital kian terbuka agresif di Indonesia dan menjadi pilar ekonomi terbesar. Jalur komersial melalui sistem digital menjadi sebuah cakrawala baru untuk memulihkan kemerosotan ekonomi.

Saat ini Perseroan telah memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang usaha media, pembuatan konten, dan penyiaran televisi digital. Bidang usaha tersebut sudah sesuai dengan tren pertumbuhan industri digital, maka dari itu Perseroan akan tetap fokus dalam mengembangkan bisnis tersebut. Di sisi lain, terdapat penghentian penggunaan pita radio untuk penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet-Switched yang menggunakan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (Wireless Broadband), dimana hal tersebut mengakibatkan Perseroan mencatatkan kerugian operasi yang berkelanjutan sejak tahun 2018.

Perseroan menerima penawaran menarik dari AII dan XL, yaitu investor strategis yang berminat untuk akuisisi LINK sebagai bagian dari pengembangan bisnis telekomunikasi mereka di Indonesia. Mempertimbangkan XL merupakan salah satu penyelenggara telekomunikasi terkemuka di Indonesia, Perseroan berpendapat bahwa akuisisi LINK oleh XL dan AII tersebut akan memperkuat posisi LINK dalam melengkapi ekosistem industri telekomunikasi di Indonesia.

Lebih lanjut, sebagian dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Rencana Transaksi juga akan digunakan untuk melunasi fasilitas pinjaman yang telah diterima Perseroan, sehingga akan mengurangi beban hutang Perseroan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan adanya kebutuhan Perseroan atas tambahan investasi untuk pengembangan bisnis digital sebagaimana

diuraikan di atas, maka Perseroan bermaksud untuk melakukan penjualan seluruh saham LINK yang dimilikinya kepada AII dan XL

Berikut adalah dampak transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan:

Proforma Neraca Perseroan Per 31 Desember 2021 (Juta Rupiah)

Uraian	Sebelum Rencana Transaksi	Penyesuaian	Setelah Rencana Transaksi
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	76.444	527.976	604.420
Piutang Usaha			
Pihak Ketiga	31.043	--	31.043
Aset Keuangan Lancar Lainnya	30.356	--	30.356
Pajak Dibayar di Muka	4.634	--	4.634
Biaya Dibayar di Muka	105	22.218	22.323
Jumlah Aset Lancar	142.582	550.194	692.776
Aset Tidak Lancar			
Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya	408.295	--	408.295
Investasi pada Entitas Asosiasi	3.835.053	(3.835.053)	--
Aset Tetap	25.451	--	25.451
Aset Takberwujud	8	--	8
Uang Muka	45.393	--	45.393
Aset Pajak Tangguhan	11.003	--	11.003
Aset Tidak Lancar Lainnya	14.889	--	14.889
Piutang Pihak Berelasi Non-Usaha	45.844	--	45.844
Aset Pengampunan Pajak	56.704	--	56.704
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.442.640	(3.835.053)	607.587
Jumlah Aset	4.585.222	(3.284.859)	1.300.363
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha			
Pihak Ketiga	1.503.870	(408.711)	1.095.159
Pihak Berelasi	65.337	(50.966)	14.371
Beban Akrual	46.427	(2.229)	44.198
Utang Pajak	33.444	(33.444)	--
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek	1.454	--	1.454
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang:			
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	1.308.092	(1.308.092)	--
Utang Sewa Pembiayaan	117	(117)	--
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	1.251.902	(1.231.027)	20.875
Pinjaman Jangka Pendek	135.000	(135.000)	--
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	58.711	--	58.711
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4.404.354	(3.169.586)	1.234.768
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	81.000	(81.000)	--
Utang Sewa Pembiayaan	14.712	(14.712)	--
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Lainnya	15.949	(4.220)	11.729
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	24.485	--	24.485
Liabilitas Pajak Tangguhan	14.330	--	14.330
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	150.476	(99.932)	50.544
Jumlah liabilitas	4.554.830	(3.269.518)	1.285.312

Proforma Neraca Perseroan Per 31 Desember 2021 (Juta Rupiah) – lanjutan

Uraian	Sebelum Rencana Transaksi	Penyesuaian	Setelah Rencana Transaksi
Ekuitas			
Modal Saham	871.084	--	871.084
Tambahan Modal Disetor - Neto	(47.723)	--	(47.723)
Komponen Ekuitas Lainnya	143.988	--	143.988
Penghasilan Komprehensif Lainnya	320.118	--	320.118
Saldo Defisit	(395.234)	(15.341)	(410.575)
Jumlah	892.233	(15.341)	876.892
Kepentingan Non-Pengendali	(861.841)	--	(861.841)
Jumlah Ekuitas	30.392	(15.341)	15.051
Jumlah liabilitas dan ekuitas	4.585.222	(3.284.859)	1.300.363

Proforma Laba (Rugi) Perseroan Per 31 Desember 2021 (Juta Rupiah)

KETERANGAN	Sebelum Rencana Transaksi	Penyesuaian	Setelah Rencana Transaksi
Pendapatan	151.800	--	151.800
Beban Layanan	(86.935)	--	(86.935)
Laba Bruto	64.865	--	64.865
Beban Penjualan	(22.763)	--	(22.763)
Beban Umum dan Administrasi	(71.196)	--	(71.196)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	(40.941)	--	(40.941)
Beban Penurunan Nilai Investasi pada Entitas Asosiasi	(1.948.688)	--	(1.948.688)
Kerugian Penurunan Nilai Aset Tidak Lancar Lainnya	(283.034)	--	(283.034)
Keuntungan Selisih Kurs - Neto	177	--	177
Keuntungan atas Pelepasan Aset Tetap - Neto	182.322	--	182.322
Lain-lain - Neto	795.146	(15.341)	779.805
Rugi Usaha	(1.324.112)	(15.341)	(1.339.453)
Beban Keuangan	(199.379)	--	(199.379)
Penghasilan Keuangan	1.092	--	1.092
Bagian atas Laba Neto Entitas Asosiasi	257.102	--	257.102
Rugi Sebelum Pajak	(1.265.297)	(15.341)	(1.280.638)
Beban Pajak Penghasilan	(567)	--	(567)
Rugi Tahun Berjalan	(1.265.864)	(15.341)	(1.281.205)

Perseroan menilai Rencana Transaksi akan memperkuat struktur keuangan Perseroan dan bisnis Perseroan sehingga dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis media dan pembuatan konten.

IV. RINGKASAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Penilai Independen yang disusun oleh KJPP sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00043/2.0042-00/BS/06/0405/1/IV/2022 tanggal 18 April 2022.

1. Objek Penilaian
798.969.286 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam) saham dalam LINK yang dimiliki

oleh Perseroan yang mewakili 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam LINK.

2. Tujuan Penilaian

Maksud dan tujuan dari penilaian ini adalah untuk memberikan opini nilai pasar atas 29,04% kepemilikan saham oleh Perseroan dalam LINK yang memiliki penyertaan dalam FMTV, ISOL, dan LNGS yang akan digunakan untuk kepentingan divestasi.

3. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Penilaian dan laporan penilaian bergantung kepada syarat-syarat pembatas sebagai berikut :

- a. Data dan Informasi yang diberikan oleh Pemberi Tugas dianggap benar dan dapat dipercaya, termasuk informasi tentang bahwa aset atau liabilitas yang menjadi obyek penilaian tidak sedang atau telah dinilai oleh Penilai Publik lainnya untuk maksud, tujuan, pengguna laporan dan tanggal penilaian yang sama atau berdekatan (dalam jangka waktu tidak lebih dari dua bulan), sesuai dengan pernyataan tertulis berupa surat representasi yang dibuat oleh Pemberi Tugas;
- b. Informasi yang diberikan oleh pihak lain kepada KJPP seperti yang disebutkan dalam laporan penilaian dianggap layak dan dapat dipercaya, tetapi KJPP tidak bertanggung jawab jika ternyata informasi yang diberikan itu terbukti tidak sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Informasi yang dinyatakan tanpa menyebutkan sumbernya merupakan hasil penelaahan kami terhadap data yang ada, pemeriksaan atas dokumen ataupun keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang. Tanggung jawab untuk memeriksa kembali kebenaran informasi tersebut sepenuhnya berada dipihak klien.
- c. Laporan ini disajikan hanya untuk Maksud dan Tujuan sesuai dengan Lingkup Penugasan yang dicantumkan pada laporan penilaian ini.
- d. KJPP tidak memperbolehkan penggunaan seluruh, sebagian ataupun sebagai rujukan dari Laporan Penilaian ini, baik untuk edaran, pernyataan, referensi ataupun dipublikasikan dalam bentuk apapun juga tanpa Izin tertulis dari KJPP.
- e. KJPP tidak memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga, selama tidak menyimpang dari peraturan dan hukum yang berlaku.
- f. Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan bagian dari aset yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
- g. Laporan Penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
- h. Proyeksi keuangan yang digunakan dalam Laporan Penilaian ini telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- i. KJPP bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- j. Penilai tidak berkewajiban memberikan kesaksian atau hadir di pengadilan karena laporan ini, berkaitan dengan terjadinya sengketa atas aset dimaksud, tanpa perjanjian tertulis terlebih dahulu.

4. Pendekatan dan Metode Penilaian

Proses penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode yang berlaku umum dalam penilaian sesuai dengan POJK No. 35/2020. Sesuai dengan lingkup Penilaian, untuk LINK, FMTV, dan ISOL kami menggunakan Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Pasar, sedangkan untuk LNGS kami hanya

menggunakan Pendekatan Pasar dikarenakan perusahaan ini tidak ada kegiatan operasional. Rincian pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) dengan menggunakan metode Discounted Cash Flow, paling sesuai apabila jumlah pendapatan yang dapat diperoleh perusahaan di masa yang akan datang dapat diperkirakan dengan cukup meyakinkan. Setelah mempelajari karakteristik dari kegiatan usaha LINK, FMTV, dan ISOL seperti kinerja keuangan historisnya, kondisi eksisting operasional, proyeksi keuangan yang disampaikan manajemen, maka kami berpendapat pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaian saham LINK, FMTV, dan ISOL, dimana metode yang akan digunakan adalah DCF dengan model arus kas bebas untuk perusahaan (*Free Cash Flow to Firm/ FCFF*).
- b. Pendekatan Pasar (Market Approach) dengan menggunakan metode Guideline Publicly Traded Company (GPTC), paling sesuai apabila terdapat perusahaan yang sepadan dan sebanding dengan perusahaan yang akan dinilai. Oleh karena itu pendekatan ini dapat digunakan dalam penilaian saham LINK, FMTV, ISOL dan LNGS.

Selanjutnya indikasi nilai yang diperoleh dari kedua pendekatan tersebut kami rekonsiliasi dengan pembobotan yang sesuai untuk mendapatkan Nilai Pasar.

5. Kesimpulan Nilai

Indikasi Nilai Pasar kepemilikan 29,04% saham atau 798.969.286 lembar saham kepemilikan Perseroan dalam LINK pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.3.789.229.000.000,- (Tiga Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) atau Rp.4.743,- (Empat Ribu Tujuh Ratus empat puluh tiga Rupiah) per lembar saham.

V. RINGKASAN PENDAPAT KEWAJARAN INDEPENDEN

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi jual beli 29,04% saham LINK milik Perseroan yang disusun oleh KJPP sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00048/2.0042-00/BS/06/0405/1/IV/2022 tanggal 21 April 2022.

1. Identitas Pihak

- a. Perseroan adalah pemilik 29,04% saham dalam LINK, yang bertindak sebagai Penjual;
- b. XL adalah calon pembeli 8,80% saham dalam LINK dari Perseroan; dan
- c. AII adalah calon pembeli 20,24% saham dalam LINK dari Perseroan.

2. Objek Penilaian

Obyek Rencana Transaksi dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini adalah penjualan 29,04% saham LINK atau 798.969.286 lembar saham yang dimiliki oleh Perseroan kepada AII dan XL ("**Obyek Jual Beli**").

3. Tujuan Penilaian

Laporan Pendapat Kewajaran ini bertujuan untuk mengkaji kewajaran atas Rencana Transaksi yang berhubungan dengan POJK No. 17/2020.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan pendapat independen ini, kami menggunakan beberapa asumsi, antara lain:

- KJPP mengasumsikan bahwa sejak Rencana Transaksi hingga penerbitan pendapat kewajaran ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap Rencana Transaksi;

- KJPP berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang;
- KJPP berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi;
- KJPP berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KJPP telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian;
- Laporan Pendapat Kewajaran ini bersifat *non-disclaimer opinion*;
- Pendapat kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan;
- KJPP bertanggung jawab atas pendapat kewajaran dan kesimpulan pendapat kewajaran;
- KJPP telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan;
- Laporan disusun hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul;
- KJPP tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintah jika hal tersebut tidak terkait dengan maksud dan tujuan laporan ini serta di luar ruang lingkup dari penugasan.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Dalam melakukan evaluasi kewajaran atas Rencana Transaksi, kami melakukan analisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Analisis Rencana Transaksi yang meliputi identifikasi dan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat Rencana Transaksi, analisis perjanjian dan persyaratan dalam Rencana Transaksi, analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi.
- Analisis kualitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi riwayat Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, analisis industri, analisis operasional dan prospek Perseroan, analisis alasan dilakukannya Rencana Transaksi, keuntungan dan kerugian Rencana Transaksi.
- Analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis laporan keuangan historikal Perseroan, analisis rasio keuangan, analisis proyeksi keuangan, analisis keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi, dan analisis nilai tambah.
- Analisis kewajaran Rencana Transaksi

6. Analisa Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

- Rencana Transaksi bukan merupakan transaksi afiliasi dikarenakan tidak terdapat hubungan afiliasi antara pihak-pihak yang bertransaksi. Namun Rencana Transaksi merupakan transaksi material, dimana perbandingan antara nilai Rencana Transaksi dengan nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar 12.618,63% dan nilai tersebut lebih dari 20% ekuitas Perseroan, sehingga menurut POJK 17/2020 Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material.

- Berdasarkan Kesepakatan Jual Beli dan persyaratan di atas tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi sehingga syarat-syarat yang ada pada Rencana Transaksi adalah wajar.
- Berdasarkan gambaran umum industri Teknologi, Media dan Telekomunikasi (TMT) diperkirakan industri ini memiliki prospek yang bagus kedepannya. Melihat prospek tersebut membuat Perseroan lebih fokus mengembangkan bisnis TMT khususnya bidang telekomunikasi, media, pembuatan konten dan penyiaran televisi digital.
- Manfaat Rencana Transaksi yaitu Perseroan dapat meningkatkan kondisi keuangan dan fokus mengembangkan bisnis digital Perseroan seiring dengan meningkatnya kebutuhan media komunikasi digital. Risiko Rencana Transaksi yaitu tidak tercapainya hasil sesuai ekspektasi yang diharapkan, risiko ini berkaitan terhadap pencapaian kinerja Perseroan dalam menjalankan usahanya.
- Alasan melakukan Rencana Transaksi adalah Perseroan membutuhkan tambahan investasi untuk fokus dalam mengembangkan usahanya di bidang media, pembuatan konten dan penyiaran televisi digital.
- Keuntungan Transaksi yaitu Perseroan dapat membayar utang, pinjaman, dan kewajiban Perseroan lainnya yang berdampak pada meningkatnya kondisi keuangan Perseroan, sehingga ke depannya Perseroan dapat mengembangkan bisnis media, pembuatan konten, dan televisi digital. Kerugian Transaksi yaitu Perseroan tidak akan memperoleh pendapatan dividen dan tambahan investasi atas hasil keuntungan usaha perusahaan asosiasi.
- Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan diperkirakan bahwa Perseroan mampu menghasilkan pendapatan dengan pertumbuhan yang positif. Dengan demikian Rencana Transaksi yang dilakukan Perseroan adalah wajar.
- Berdasarkan laporan keuangan sebelum dan setelah Rencana Transaksi diketahui bahwa Rencana Transaksi meningkatkan rasio likuiditas Perseroan dan menurunkan rasio solvabilitas.
- Dengan membandingkan laba bersih tanpa Rencana Transaksi dan dengan Rencana Transaksi, diketahui bahwa laba bersih dengan Rencana Transaksi lebih tinggi dibanding tanpa Rencana Transaksi.

Berdasarkan perbandingan Nilai Rencana Transaksi dengan Nilai Pasar, harga Rencana Transaksi 1,21% di atas dari nilai pasar, dan berada dalam batasan $\pm 7,5\%$, maka harga yang ditetapkan adalah wajar.

7. Kesimpulan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi

Berdasarkan analisa pendapat kewajaran di atas KJPP berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah WAJAR.

VI. RUPS

Merujuk pada Pasal 14 butir c POJK No. 17/2020, maka Perseroan akan meminta persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi ("**RUPS Independen**"), dimana pengumuman RUPS Independen telah diumumkan bersamaan dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini.

RUPS yang merupakan RUPS Independen akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 6 Juni 2022
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Monas, Hotel Aryaduta, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, Gambir, Jakarta 10110

Mata Acara RUPS:

Persetujuan pelaksanaan rencana transaksi pengalihan sejumlah 798.969.286 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh enam) saham milik Perseroan dalam PT Link Net Tbk. (“**LINK**”) yang mewakili 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam LINK (“**Rencana Transaksi**”) yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, serta memberikan persetujuan, pengesahan, dan/atau ratifikasi atas tindakan dan/atau rencana Perseroan serta tindakan Direksi Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi.

Adapun berdasarkan Pasal 44 POJK No. 15/2020, RUPS independen dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

1. RUPS Independen dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen Perseroan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen Perseroan;
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen pertama di atas tidak tercapai, maka RUPS Independen kedua dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen Perseroan dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen Perseroan yang hadir dalam RUPS Independen kedua;
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua di atas tidak tercapai, maka RUPS Independen ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK dan kuorum keputusan pada RUPS ketiga ini adalah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen Perseroan yang hadir dalam RUPS Independen ketiga.

VII. PIHAK INDEPENDEN

Pihak-pihak independen yang telah ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan:

1. **Makes & Partners Law Firm**, Konsultan Hukum yang ditunjuk Perseroan untuk membantu Perseroan dalam menyiapkan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi.
2. **Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia)**, akuntan publik yang ditunjuk untuk membantu Perseroan dalam menyusun Laporan Keuangan sehubungan dengan Rencana Transaksi.
3. **Doli Siregar & Rekan**, Kantor Jasa Penilai Publik yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat penilai independen sehubungan Rencana

Transaksi.

VIII. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi menyatakan bahwa Rencana Transaksi bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa Rencana Transaksi tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi tersebut. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa seluruh informasi material yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan informasi yang disajikan dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

IX. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lebih lanjut sehubungan dengan Rencana Transaksi, Pemegang Saham Perseroan dapat menghubungi Perseroan dengan alamat korespondensi sebagai berikut:

PT First Media Tbk.

Kantor Pusat:

Gedung BeritaSatu Plaza, Lantai 4, Suite 401
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 – 36, Jakarta 12950
Telepon: (021) 5278811
Faksimili: (021) 5278833
Website: www.firstmedia.co.id
Email: corporate.secretary@firstmedia.com

U.p. Corporate Secretary

Jakarta, 28 April 2022
Direksi PT First Media Tbk.

INFORMATION DISCLOSURE TO THE SHAREHOLDERS OF PT FIRST MEDIA TBK. IN COMPLIANCE WITH OJK REGULATION NO. 17/POJK.04/2020 ON MATERIAL TRANSACTIONS AND CHANGES IN BUSINESS ACTIVITIES

If you have difficulty understanding the information contained in this Information Disclosure or are in doubt in making a decision, we recommend that you consult with a securities broker, investment manager, legal advisor, public accountant or other professional adviser.



PT First Media Tbk.
Domiciled in South Jakarta, Indonesia
("Company")

Business Activities:
Telecommunication and Content Provider

Head Office:
BeritaSatu Plaza 4th Floor Suite 401
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 - 36, Jakarta 12950
Telephone: (021) 5278811
Facsimile: (021) 5278833
Website: www.firstmedia.co.id
Email: corporate.secretary@firstmedia.com

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, EITHER SOLELY OR SEVERALLY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE VALIDITY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS DISCLOSED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE, AND AFTER CAREFULLY RESEARCHING, CONFIRMING THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS TRUE AND THERE ARE NO IMPORTANT, MATERIAL AND RELEVANT FACTS WHICH WERE NOT DISCLOSED OR OMITTED, SO THAT CAUSES THE INFORMATION PROVIDED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE TO BE UNTRUE AND/OR MISLEADING.

Extraordinary General Meeting of Shareholders for approval of Proposed Transaction to be held on 6 June 2022.

DEFINITION

Affiliation : Affiliation is: (a) family relationship due to marriage and descendant until the second degree, both horizontally and vertically; (b) the relationship between a party and an

employee, director or commissioner of that party; (c) the relationship between 2 (two) companies where there are 1 (one) or more members of the same board of directors or commissioners; (d) the relationship between a company and a party, directly or indirectly, controlling or being controlled by that company; (e) relationship between 2 (two) companies controlled, directly or indirectly, by the same party; or (f) the relationship between the company and the major shareholders.

AII	:	Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd., a company duly established under and subject to the law of Malaysia and domiciled in Malaysia.
AGB	:	Axiata Group Berhad, a company duly established under and subject to the law of Malaysia and domiciled in Malaysia.
ALD	:	Asia Link Dewa Pte. Ltd., a company duly established under and subject to the law of Republic of Singapore and domiciled in Singapore.
FMTV	:	PT First Media Television, a company duly established under and subject to the law of Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta.
ISOL	:	PT Infra Solusi Indonesia, a company duly established under and subject to the law of Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta.
Information Disclosure	:	This Information Disclosure which stipulates information related to the Proposed Transaction which is prepared to comply with POJK No. 17/2020 (as defined below).
KJPP	:	Public Appraisal Service Office (KJPP) Doli Siregar & Rekan as independent appraisal registered in Financial Authority Service, which appointed by the Company.
Financial Statement	:	Financial Statement of the Company audited by Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan for the period ended on 31 December 2021.
LINK	:	PT Link Net Tbk., a company duly established under and subject to the law of Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta.
LNGS	:	Link Net Global Solution Pte. Ltd., a company duly established under and subject to the law of Republic of Singapore and domiciled in Singapore.
Transaction Object	:	798,969,286 (seven hundred ninety eight million nine hundred sixty nine thousand two hundred eighty six) shares in LINK owned by the Company which represent 29.04% (twenty nine point zero four percent) of the total

- issued and paid up capital in LINK (excluding treasury shares).
- OJK : Financial Services Authority, means an independent institution and free from interference of other parties, which has the functions, duties, and authorities of regulation, supervision, inspection, and investigation as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority (“**Law No. 21/2011**”). As of 31 December 2021, function, duty, and authority of financial authority service in Capital Market sector was assigned from Bapepam and LK to OJK, in regard to Article 55 Law No. 21/2011, or its successor and assignees.
- POJK No. 15/2020 : OJK Regulation Number 15/POJK.04/2020 on tentang Planning and Organizing the General Meeting of Shareholders of a Public Company
- POJK No. 17/2020 : OJK Regulation Number 17/POJK.04/2020 on Material Transaction and Change of Business Activity.
- POJK No. 42/2020 : OJK Regulation Number 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.
- POJK No. 35/2020 : OJK Regulation Number 35/POJK.04/2020 on Valuation and Presentation of Business Valuation Reports in the Capital Market.
- Controller : Controller of Public Company as stipulated under OJK Regulation No. 9/POJK.04/2018 on Acquisition of Public Company, which is a party which directly or indirectly: (a) owned more than 50% (fifty percent) shares of Public Company with voting right and fully paid up; or (b) has the ability to determine, directly or indirectly, in any way the management and/or policy of the Public Company.
- Independent Shareholder : Shareholders who do not have a personal economic interest relating to particular transaction and: (a) are not members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, and the Controller; or (b) is not an Affiliate of the members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, and Controllers.
- Company : PT First Media Tbk., a company duly established under and subject to the law of Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta.
- GMS : Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company which shall be held on 6 June 2022 or other date as notified later by the Company.
- Affiliated Transaction : Has meaning as defined under POJK No. 42/2020.

Conflict of Interest Transaction	:	Has meaning as defined under POJK No. 42/2020.
Material Transaction	:	Has meaning as defined under POJK No. 17/2020.
XL	:	PT XL Axiata Tbk.

I. FOREWORD

This Information Disclosure is conveyed to the Company's Shareholder in connection with the Company's plan to sell and transfer to AII and XL of all Company's ownership in LINK amounting 798,969,286 (seven hundred ninety eight million nine hundred sixty nine thousand two hundred eight six) shares which represents 29.04% (twenty nine point zero four percent) of all shares issued and fully paid up in LINK (excluding treasury shares) ("**Proposed Transaction**") with total transaction amount of IDR3,835,052,572,800 (three trillion eight hundred thirty five billion fifty two million five hundred seventy two thousand eight hundred Indonesia Rupiah).

Concurrently with the Proposed Transaction, ALD also plans to sell and transfer to AII and XL of ALD's ownership in LINK amounting 1,017,766,198 (one billion seventeen million seven hundred sixty six thousand one hundred ninety eight) shares which represent 36.99% (thirty six point ninety nine percent) of total issued and paid up capital in LINK (excluding treasury shares).

The total shares owned by the Company and ALD amounting 1,816,735,484 (one billion eight hundred sixteen thousand seven hundred thirty five thousand four hundred eighty four) shares which represent 66.03% (sixty six point zero three percent) of total issued and paid up capital in LINK (excluding treasury shares).

The Proposed Transaction is Material Transaction which must obtain prior approval from GMS as stipulated under Article 3 sub-article (2) and Article 6 sub-article (1) paragraph d point 1 of POJK No. 17/2020, where the amount of Proposed Transaction is more than 50% (fifty percent) of the Company equity under the Financial Statement. Furthermore, in consideration that the Company had booked continuous operational loss since 2018 and requirement under Article 14 paragraph c POJK No. 17/2020, therefore the Proposed Transaction must obtain approval from Independent Shareholders of the Company.

The Proposed Transaction is neither Affiliated Transaction nor Conflict of Interest Transaction under POJK No. 42/2020, where no affiliate relationship between the Company and XL and AII as buyer and no difference in economic interest between the Company and each members of Board of Directors, Board of Commissioners, major shareholders, and Controller which may detrimental to the Company.

In relation to the matters as set forth above and in accordance with the prevailing laws and regulations, particularly POJK No. 17/2020, the Board of Directors of the Company announce this Information Disclosure in order to provide more comprehensive information and description to the Company shareholder regarding the Proposed Transaction which shall be carried out by the Company, so that the shareholders of the Company, especially Independent Shareholder, may consider to grant approval in GMS.

II. DESCRIPTION ON THE MATERIAL TRANSACTION

A. Transaction Object

798,969,286 (seven hundred ninety eight million nine hundred sixty nine thousand two hundred eighty six) shares in LINK owned by the Company which represent 29.04% (twenty nine point zero four percent) of total issued and paid up capital in LINK (excluding treasury stock).

B. Transaction Amount

The amount of Proposed Transaction which to be received by the Company is IDR3,835,052,572,800 (three trillion eight hundred thirty five billion fifty two million five hundred seventy two thousand eight hundred Indonesia Rupiah) from sale and transfer of 798,969,286 (seven hundred ninety eight million nine hundred sixty nine thousand two hundred eighty six) shares which represent 29.04% (twenty nine point zero four percent) of total issued and paid-up capital in LINK as further elaborated in paragraph C below. The proceed from the Proposed Transaction that will be received by the Company is 12,618.63% of the Company's equity under the Financial Statements, which based on POJK No. 17/2020 is a Material Transaction that must obtain prior approval from GMS.

C. Brief Description on the Proposed Transaction

In relation to the Proposed Transaction, the Company, ALD, AII, and XL had entered into *Share Purchase Agreement* dated 27 January 2022 (“SPA”) as conveyed by the Company under the letter number SB-005/FM-CSL/OJK/I/2022 dated 27 January 2022 on Report of Material Information or Fact.

Below are information on several provisions under the SPA:

The Parties	:	i. the Company; ii. ALD (collectively with the Company, referred to as the “ Sellers ”); iii. XL; and iv. AII (collectively with XL, referred to as the “ Purchasers ”).
Object	:	Sale and transfer of 1,816,735,484 (one billion eight hundred sixteen million seven hundred thirty-five thousand four hundred eighty four) shares in LINK which owned by the Company and ALD consecutively: (i) 29.04% (twenty nine point zero four percent); and (ii) 36.99% (thirty six point nine nine percent); which collectively represents 66.03% (sixty six point zero three percent) of all issued and paid-up capital in LINK (excluding treasury stock), in accordance with the terms and conditions as stipulated under the SPA.
Sale and Purchase Price	:	IDR8,720,330,323,200 (eight trillion seven hundred twenty billion three hundred thirty

		<p>million three hundred twenty three thousand two hundred Indonesia Rupiah) ("Sale Price").</p> <p>The amount to be received by the Company is 43.98% (forty-three point nine eight percent) of the Sale Price which is amounting IDR3,835,052,572,800 (three trillion eight hundred thirty five billion fifty two million five hundred seventy two thousand eight hundred Indonesia Rupiah).</p> <p>The amount to be received by ALD is 56.02% (fifty six point zero two percent) of the total Sale Price which is amounting IDR4,885,277,750,400 (four trillion eight hundred eighty five billion two hundred seventy seven million seven hundred fifty thousand four hundred Rupiah).</p>
Condition Precedent	:	<p>Condition Precedent under SPA which must be fulfilled before the Proposed Transaction to be concluded, among others are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. obtaining approval from AGB shareholders, to approve the Proposed Transaction; ii. obtaining the approval from the Company shareholders to approve the Proposed Transaction; and iii. there is no decision letter, determination, decision or other orders (which is final and cannot be appealed) issued by the court with competent jurisdiction or OJK which has the effect of withholding or in other ways prohibiting the Proposed Transaction and which remains valid on the Completion Date. <p><u>Note:</u> "Completion Date" is the date which the completion of Proposed Transaction take place.</p>
Representation and Warranties of Seller	:	<p>Sellers hereby represent and warrants, among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Sellers are legal entity duly established under the laws of their respective countries; ii. Sellers are authorized to sign and perform each of its obligations under the SPA; iii. Sellers are the legitimate owner of the Transaction Object; iv. there are no demands, lawsuits, or court orders that prohibit the SPA to be carried out; v. the audited financial statement of LINK for year 2020 and first semester of book year 2021 had been presented in accordance with GAAP and reflecting the actual LINK financial condition.

Sellers Obligation	:	Up to the Completion Date, the Company and ALD as Sellers are obliged to warrant, among others: i. LINK must remain maintain its business as usual; ii. LINK does not amend its article of association or signed any agreements that may limit LINK to perform its business as usual; iii. LINK shall not carry out any acquisition, spin off, or reorganization; iv. LINK shall not acquire any business nor assets, save for its business as usual; v. LINK shall not amend its material agreement which may detrimental to LINK.
Governing Law	:	Law of Republic of Singapore.
Dispute Settlement	:	Singapore International Arbitration Centre

D. Information Regarding the Parties in the Proposed Transaction

1. Company as Seller

Brief History

The Company was duly established under the name of PT Safira Ananda, established based on Deed No. 37 dated January 6, 1994 made before Siti Safariyah, S.H., as a substitute for Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, S.H., Notary in Jakarta. The deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia under Decree no. C2-1.446 HT.01.01.Th.95 dated February 1, 1995, and registered in register book at the Central Jakarta District Court under No. 549/III/1995 dated 30 March 1995, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated October 8, 1999, Supplement No. 6613/1999.

The Articles of Association have been amended several times, most recently through the Deed of Statement of Meeting Resolutions on the Amendments to the Articles of Association no. 15 dated 25 June 2021, made before Andalia Farida, S.H., M.H., Notary in Jakarta, which includes, among others, the approval of shareholders for amendment to the provisions of Article 9 (concerning the General Meeting of Shareholders), Article 10 (concerning Place, Announcement and Invitation to the GMS), Article 11 (concerning Rights of Shareholders, the presence of other Parties at the GMS and the Chairperson of the GMS), Article 12 (concerning Quorum, Voting Rights and Resolutions of the GMS) and Article 13 (concerning Minutes of the GMS and Summary of the minutes of the GMS) of the Article of Association of the Company. The deed has been notified to the Minister of Law and Human Rights as evident in the Letter of Acceptance of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0430925 dated July 23, 2021

and registered in the Company Register under No. AHU-0127702.AH.01.11.Year 2021 dated July 23, 2021 (“**Deed No. 15/2021**”).

The current business activities of the Company are business in the field of telecommunications and content provision.

Purposes and Objectives and Main Business Activities

The purposes and objectives as well as the Company's business activities are as stated in Article 3 of the Company's articles of association as stated in the Deed No. 15/2021, which are as follows:

- (1) The purposes and objectives of the Company are to engage in telecommunications, either through cable, wireless or satellite, as well as the provision of content, both video content and television and radio broadcast programs, as well as content through cellular mobile networks and/or local fixed wireless networks.
- (2) To achieve the aims and objectives mentioned above, the Company may carry out the following business activities:
 - i. Operate, maintain or provide access to facilities for telecommunication using telecommunication networks, either based on a single technology or a combination of various technologies, either via cable, wireless or satellite, both fixed and mobile networks, including: local fixed network, fixed network direct long distance and international connections, closed fixed networks, terrestrial mobile networks, cellular, satellite and their developments;
 - ii. Providing telecommunication services using telecommunication network capacity, either based on single technology or a combination of various technologies, either via cable, wireless or satellite, including basic telephony services, value-added telephony services, multimedia services including: telephone services, facsimile, telex, telegraph, internet access, internet interconnection services (network access point/NAP), internet telephony services, both for the public, businesses, and households, including its development, and
 - iii. Content providers, both production, aggregator, and content distribution, including information, entertainment, multimedia, television and radio broadcasting, applications (software) and online video streaming, both live and online voice.

Capital Structure and Shareholders Composition

Based on the Register of Shareholders of the Company with ownership of 5% or more as of 31 March 2022 issued by PT Sharestar Indonesia, as the Company's Securities Administration Bureau, the capital structure and shareholders composition of the Company are as follows:

Shareholders	Nominal Value IDR500 per share		
	Total Share	Nominal Value (IDR)	%
Authorized Capital	6,967,587,600	3,483,793,800,000	
Issued and Paid-Up Capital			
- PT Reksa Puspita Karya	588,167,378	294,083,689,000	33.76
- PT Trijaya Putra Mulia	476,772,713	238,386,356.500	27.37
- PT Ciptadana Capital	342,564,386	171,282,193,000	19.66
- Public	334,663,430	167,331,715,000	19.21
Total Issued and Paid-Up Capital	1,742,167,907	871,083,953,500	100
Total Shares in Portfolio	5,225,419,693	2,612,709,846,500	-

Management and Supervision

Based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions of PT First Media Tbk No. 14 dated 25 June 2021, made before Andalia Farida, S.H., M.H. Notary in Jakarta, which has been notified to the Ministry of Law and Human Rights as evident in Letter of Acceptance of Notification of Changes in Company Data No. AHU-AH.01.03-043095 dated 23 July 2021 and registered in the Company Register under No. AHU-0127135.AH.01.11.In 2021 dated 22 July 2021, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

Board of Directors

President Director	:	Ir. Harianda Noerlan
Director	:	H. RM. Hernowo Hadiprodjo, S.H., M.B.A.
Director	:	Johannes Tong
Director	:	Budi Erawanto

Board of Commissioners

President Commissioner	:	Drs. H. R. Soeparmadi
Independent Commissioner	:	Drs. Teguh Pudjowigoro
Independent Commissioner	:	Widjaya Hambali
Commissioner	:	Lim Benni

Company's Financial Position

The summary of the Company's consolidated financial position for the year ended 31 December 2021 is as follows:

(in million IDR)

FINANCIAL POSITION	31 December 2019	31 December 2020	31 December 2021
Asset			
Current Asset	344,763	133,685	142,582

Non-Current Asset	6,829,732	6,472,362	4,442,640
Total Asset	7,174,495	6,606,047	4,585,222
Liabilities and Equity			
Short-term Liabilities	4,069,059	4,920,800	4,404,354
Long-term Liabilities	2,159,695	759,426	150,476
Total Liabilities	6,228,754	5,680,226	4,554,830
Equity	945,741	925,821	30,392
Total Liabilities and Equity	7,174,495	6,606,047	4,585,222

(in million IDR)

PROFIT AND LOSS	31 December 2019	31 December 2020	31 December 2021
Net Sales	248,909	188,697	151,800
(Cost) of Goods Sold	(144,562)	(103,529)	(86,935)
Gross Profit	104,347	85,168	64,865
Other Income (Expenses)	(345,368)	(81,155)	(1,330,162)
Profit (Loss) Before Income Tax	(241,021)	4,013	(1,265,297)
Profit (Loss) Current Year	(256,057)	(21,478)	(1,265,864)

2. ALD as Seller

Brief History

ALD is a company incorporated under the laws of the Republic of Singapore and domiciled in Singapore (Company Registration No. 201108211K) on April 5, 2011 based on the ALD Memorandum and Articles of Association which has obtained a Certificate of Confirming Incorporation of Company dated April 6, 2011 from Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) Singapore. Until the date of this Disclosure of Information is published, ALD has not changed its Articles of Association

ALD's office is at 77 Robinson Road #06-03, Robinson 77, Singapore 068896 with Fax Number: (65) - 65007323 and Telephone Number: (65) - 65007328.

Business Activities

On the date this Information Disclosure is published, the purpose and objective of ALD is a holding company of investment companies.

ALD's current business activities are investing in LINK and FMTV.

Capital Structure and Shareholders Composition

As of the date of this Information Disclosure, the capital structure and share ownership in ALD are as follows:

	Nominal Value IDR10,000 per shares		
	Shares Classification	Total Shares	Total Nominal Value (IDR)
Issued and Paid-Up Capital			
Asia Link Company Limited (ALC)	Ordinary	10,000,000	100,000,000,000
Asia Link Company Limited (ALC)	Preferred	138,151,537	1,381,515,370,000

Management and Supervision

As of the date of this Information Disclosure, management of ALD are as follows:

Board of Directors

Director : Tan Ting Luen

Director : Sigit Prasetya

Director : Richard Kidarsa

Director : Minki Brian Hong (Alternative Director to Sigit Prasetya)

3. XL as Purchaser

Brief History

XL domiciled in South Jakarta, is established pursuant to Deed of Establishment No. 55 dated October 6, 1989 as amended by Deed No. 79 dated January 17, 1991, both made before Rachmat Santoso Notary in Jakarta, that has been approved pursuant to the Minister of Justice Decree No. C2-515.HT.01.01.Th.91 and has been announced in State Gazette of Republic of Indonesia No. 90 dated November 8, 1991, Supplement No. 4070.

The Articles of Association of XL have been amended several times lastly pursuant to Deed No. 51 dated 23 April 2021 made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on Decree No. AHU-0027862.AH.01.02.Tahun 2021 dated May 6, 2021 that has been registered in the company register No. AHU-00844321.AH.01.11.Tahun 2021 dated May 6, 2021.

XL's address is at Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 11-12, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta 12950, Indonesia with "EXCL" as the stock code.

As of now, the purposes and objectives of XL are to carry out business activities in the field of telecommunications, other monetary intermediaries, computer programming and consulting activities, computer consulting and computer facility management activities, information service activities, and other management consulting activities.

Purposes and Objectives and Main Business Activities

The business activity of XL are as stated in Article 3 of the Articles of Association as stated in the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 51 dated 23 April 2021, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which has been approved by the Minister of Law and Human Rights under

Decree No. AHU-0027862.AH.01.02.Year 2021 dated May 6, 2021 and registered in the Company Register under No. AHU-00844321.AH.01.11.Year 2021 dated May 6, 2021:

- (1) The purposes and objectives of XL are to carry out activities in the field of telecommunications operations, programming and computer consulting activities, information service activities, wholesale trading, management consulting activities, and financial activities.
- (2) To achieve the above purposes and objectives, XL may carry out the following business activities:
 - a. Telecommunication business:
 - i. Telecommunications network operation which includes but is not limited to:
 - Telecommunications Activities via cable;
 - Wireless Telecommunications Activities.
 - ii. The operation of telecommunications services including but not limited to:
 - Internet service provider;
 - Communication System Service (Data Communication System Service);
 - Internet Telephony Service for Public Interest (ITKP);
 - Internet Interconnection Service (NAP);
 - Premium SMS Content Service;
 - Other Multimedia Services
 - b. Other monetary intermediaries;
 - c. Wholesale:
 - i. Wholesale of Computer and Computer Peripherals;
 - ii. Wholesale of Software;
 - iii. Wholesale of Telecommunication Equipment.
 - d. Programming, Computer consulting and other related activities:
 - i. Other Computer Programming Activities.
 - e. Computer consulting and other computer facilities management activities:
 - i. Information Security Consulting Activities;
 - ii. Computer Consulting and Other Computer Facilities Management Activities;
 - iii. Internet of Things Consulting and Design Activities;
 - f. Information service activities:
 - i. Data Processing Activities;
 - ii. Hosting Activities and related thereto;
 - iii. Web Portals and/or Digital Platforms Without Commercial Purposes;
 - iv. Web Portals and/or Digital Platforms For Commercial Purposes.
 - g. Other management consultaion activities.

- (3) To achieve the above business activities and to support XL main business activities, XL may carry out supporting business activities as follows:
- a. Plan, engineer, build, provide, develop, and operate, lease, maintain, and procure telecommunication facilities/facilities including procurement of resources to support the Company's business in the provision of telecommunication services and/or networks;
 - b. Increase as much as possible the business of providing telecommunications services and networks, so as to achieve the desired and required capacity of the community in the context of improving services to the wider community;
 - c. Carrying out business and operating activities (which include marketing and sales of telecommunication networks and/or services organized by the Company), conducting maintenance, research, development, telecommunication facilities, providing non-formal Education and Training in the telecommunications sector both within or abroad;
 - d. Organizing other telecommunications services and networks, including information technology services and/or networks; and
 - e. Organizing other activities deemed necessary to support and/or related to telecommunications operations, computer programming and consulting activities, information service activities, wholesale trading activities, management consulting activities, and financial activities.

Capital Structure and Shareholders Composition

Based on XL's Register of Shareholders which reached 5% or more as of March 31, 2022 issued by PT Datindo Entrycom, as XL's Securities Administration Bureau, XL's capital structure and shareholder composition are as follows:

Shareholders	Nominal Value Rp100 per share		
	Total Shares	Nominal Value (IDR)	%
Authorized Capital	22,650,000,000	2,265,000,000,000	
Issued and Paid-Up Capital			
- Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd.	6,559,247,263	655,924,726,300	61.16
- Public	4,108,939,713	410,893,971,300	38.31
- Treasury Stock	56,487,800	5,648,780,000	0.53
Total Issued and Paid-Up Capital	10,724,674,776	1,072,467,477,600	100
Total Shares in Portfolio	11,925,325,224	1,192,532,522,400	-

Management and Supervision

Based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 50 dated April 23, 2021, made before Aulia Taufani, S.H., Notary in South Jakarta, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights as stated in the Letter of Acceptance of Notification of Changes to Company Data PT XL AXIATA Tbk. No.

AHU-AH.01.03-0289683 dated May 5, 2021 and registered in the Company Register under No. AHU-0083195.AH.01.11.Year 2021 dated May 5, 2021, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of XL is as follows:

Board of Directors

President Director : Dian Siswarini
 Director : Yessie D. Yosetya
 Director : Abhijit Jayant Navalekar
 Director : David Arcelus Oses
 Director : Budi Pramantika
 Director : I Gede Darmayusa

Board of Commissioners

President Commissioner : Muhamad Chatib Basri
 Commissioner : Vivek Sood
 Commissioner : David Robert Dean
 Independent Commissioner : Yasmin Stamboel Wirjawan
 Independent Commissioner : Muliadi Rahardja
 Independent Commissioner : Julianto Sidarto
 Commissioner : Dato' Mohd Izzadin Idris
 Commissioner : Doktorandus Hans Wijayasuriya

4. All as Purchaser

Brief History

All, domiciled in Malaysia was established based on Registration Number 199501035534 (364736-V) dated 25 October 1995, under the name Nynex Indocel Holding Sdn., which obtained status as a company with limited Private shares on March 27, 2005 and changed its name to All on July 6, 2010.

Business activities

All was established for the purpose of taking part and holding share ownership in PT Excelcomindo (currently XL) which was incorporated under Indonesian law.

Capital Structure and Shareholders Composition

Issued Capital : RM100.000
 Total Shares : 100.000 Ordinary Shares

Shareholders	Nominal of Shares	%
- Axiata Investments (Labuan) Sdn. Bhd.	RM100.000	100%

Management and Supervision

Director : Suryani Binti Hussein
 Director : Tan Gim Boon
 Director : Vivek Sood

E. Information Regarding the Object of the Transaction

LINK

Brief History

LINK was first established under the name “PT Seruling Indah Permai” based on the Deed of Establishment of a Limited Liability Company PT Seruling Indah Permai No. 93, dated March 14, 1996, drawn up before Misahardi Wilamarta, S.H., Notary in Jakarta, as amended based on the Deed of Amendment to the Articles of Association no. 304 dated July 26, 1996, drawn up before Yuliandi Ermawanto, S.H., substitute for Misahardi Wilamarta, S.H., Notary in Jakarta. These deeds have been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia based on Decree No. C2-8324 HT.01.01.Th.96, dated August 7, 1996.

The Articles of Association have been amended several times, most recently through the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 13 dated July 19, 2021, drawn up before Rini Yulianti, S.H., Notary in East Jakarta. AHU-AH.01.03-0429788 dated 19 July 2021 (“**Deed 13/2021**”). LINK amended its office address based on deed number 11 dated 11 October 2021 by Notary Rini Yulianti, S.H., notary in Jakarta. The deed has been received and recorded in the Legal Entity Administration System of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter number AHU-AH.01.03-0459106 dated 11 October 2021.

Currently, LINK's current business activities are running a business in the field of cable-based fixed network operation, multimedia services, internet access services, and business management consulting services.

Purposes and Objectives and Main Business Activities

The purposes and objectives and business activities of LINK are as stated in Deed 13/2021, which are as follows:

- The purposes and objectives of LINK are to operate in the field of providing telecommunications activities with cables, internet service providers, communication system services, internet interconnection services (NAP), other multimedia services, wireless telecommunications activities, satellite telecommunications activities, other value-added telephony services, internet telephony services for public purposes (ITKP), other management consulting activities, call center activities, wholesale trading on a fee or contract basis, wholesale trading of computers and computer equipment, wholesale software trading, wholesale trading of telecommunication equipment, wholesale of various goods, telecommunications installations, other computer programming activities, computer consulting activities and other computer facilities management, and other information technology and computer services activities.
- To achieve the purposes and objectives mentioned above, LINK may carry out the following business activities:

Main Business Activities, namely:

- i. Wired Telecommunications Activities, including operating, maintaining or providing access to facilities for transmitting voice, data, text, sound and video using wired telecommunications infrastructure, such as operating and maintaining conversion and delivery facilities to provide point-to-point communications over land lines, microwave or data channel communication and satellite, operation of cable distribution system (i.e. for distribution of data and television signal) and telegraph and other non-vocal communication equipment using own facilities. Where the transmission facility performs this activity, it can be based on a single technology or a combination of various technologies. This includes purchasing access and network capacity from owners and operators of the network and providing telecommunications services using this capacity for businesses and households and providing internet access by infrastructure operators with cables. Network operation activities for fixed telecommunications intended for the implementation of public telecommunications and leased circuits. This includes data communication connection activities whose delivery is carried out in packets, through a central office or through other networks, such as the Public Switched Telephone Network (PSTN). This includes the operation of a terrestrial network that serves certain mobile subscribers, including radio trunking services and radio calling services for the public;
- ii. Internet Service Provider (Internet Access Services), includes business services offered by a company to its customers to access the internet, or can be referred to as a gateway to the internet;
- iii. Communication System Services, including communication system services, such as VSAT (Very Small Aperture Terminal) services. VSAT is a system that can be used for sending voice, images, data, information and packets. Those who use VSAT facilities are RPUU, Radio Trunking, STBS, and others;
- iv. Internet Interconnection Services (NAP), includes activities to provide access and/or routing for internet access service providers. In providing access for internet access service providers, internet interconnection service providers may provide a network for internet transmission. Internet interconnection service providers must be connected to each other through interconnection. The interconnection service provider regulates traffic for the provision of internet access services; and
- v. Other Multimedia Services, including other multimedia service activities that are not yet included in the internet service provider group (internet access services), communication system services, telephony internet services for public purposes (ITKP) and internet interconnection services (NAP).

Supporting Business Activities:

- i. Wireless Telecommunications Activities, including network operation activities that serve mobile telecommunications using cellular technology on the earth's surface. Its activities include operating, maintaining or providing access to facilities for transmitting voice, data, text, voice and video using wireless communications infrastructure and maintenance and operation of paging numbers, as well as cellular telecommunications networks

and other wireless telecommunications networks. The transmission facility provides omni-directional transmission over the airwaves which may be based on a single technology or a combination of several technologies. Including purchasing access and network capacity from network owners and operators as well as providing wireless network services (except satellite) for business and household activities and providing internet access through wireless network infrastructure operators;

- ii. Satellite Telecommunication Activities include network operation activities that serve mobile telecommunications through satellites, earth stations, central gateways and connecting networks. Activities in this group include operating, maintaining or providing access to facilities for transmitting voice, data, text and video using satellite telecommunications infrastructure, sending audio-visual or text programs received from cable networks, local television stations or radio networks to consumers via satellite systems. directly connected to the home (units classified here generally do not come from programming material). Including the activities of providing internet access through satellite infrastructure operators;
- iii. Other Value-Added Telephony Services, including other activities of telephony value-added services such as calling cards, and including other telecommunications support services;
- iv. Internet Telephony Services for Public Purposes (ITKP), includes business services for transmitting calls over the Internet Protocol (IP) network. This activity provides internet telephony of a commercial nature, connected to a telecommunications network;
- v. Other Management Consulting Activities, including provision of advisory assistance, guidance and business operations and other organizational and management issues, such as strategic and organizational planning; decisions related to finance; marketing objectives and policies; human resource planning, practices and policies; scheduling planning and production control. The provision of these business services may include advice, guidance and operational assistance for various management functions, management consulting for agronomists and agricultural economists in agriculture and the like, design of accounting methods and procedures, cost accounting programs, budget oversight procedures, providing advice and assistance for business and community services in planning, organizing, efficiency and control, management information and others;
- vi. Call Center Activities, including call center services, such as Inbound Call Centers (calls in), answering calls from customers by human operators, automated call distribution, telephone and computer integration, interactive voice response systems or similar methods for receiving requests, providing information products relating to customer assistance requests or channeling complaints or complaints from customers; Outbound Call Center (outbound calls), using similar methods to sell or market goods or services to potential customers, conduct market research or public opinion polls and similar activities to customers;
- vii. Wholesale Trade on the basis of Fees or Contracts, includes the business of agents who receive commissions, intermediaries (brokers), auctions, and other wholesalers who trade goods domestically and abroad on behalf of other parties. Its activities

include commission agents, brokerage of goods and all other large trades selling on behalf of and at the expense of other parties; activities involved in joint selling and buying or conducting transactions on behalf of the company, including via the internet; and agents involved in trades such as agricultural raw materials, live animals; textile raw materials and semi-finished goods; fuel, ores, metals and chemical industry, including fertilizers; food, drink and tobacco; textiles, clothing, fur, footwear and leather goods; timber and building materials; machinery, including office machinery and computers, industrial equipment, ships, aircraft; furniture, household goods and hardware; auction house wholesale trading activities. Excluding the wholesale trading of cars and motorcycles, they are included in groups 451 to 454;

- viii. Wholesale of Computers and Computer Equipment, including wholesale of computers and computer equipment;
- ix. Software Wholesalers, including software wholesalers;
- x. Wholesale of Telecommunication Equipment, includes the wholesale trading of telecommunications equipment, such as telephone and communication equipment;
- xi. Wholesale of Various Kinds of Goods, including wholesale trading of various kinds of goods without specializing in certain goods (without any speciality);
- xii. Telecommunication Installation, includes the installation of telecommunications installations in buildings for both residential and non-residential premises, such as antenna installation. This group also includes the installation, maintenance and repair of telecommunications installations at telephone/telegraph exchanges, microwave radar transmitting stations, small earth stations/satellite stations and the like. Including the installation of transmission and telecommunications network activities;
- xiii. Other Computer Programming Activities, including consulting related to the analysis, design and programming of other ready-to-use systems (other than those covered in groups 62011 and 62012). This activity usually involves analyzing the needs of computer users and their problems, solving problems, and making software related to solving these problems. This includes writing simple programs according to the needs of computer users. Designing the structure and content of, and/or writing the computer code needed to create and implement, such as system software (updates and fixes), application software (updates and fixes), databases and web pages. This includes software customization, such as modification and adjustment of existing application configurations so that they function within the client information system environment. Similar activities carried out as an integral part of the sale of software are included in subclass 47413;
- xiv. Other Computer Consulting and Computer Facilities Management activities, including consulting efforts on the type and configuration of computer hardware with or without associated software applications. Planning and design of computer systems that integrate hardware, software and computer communication technology. Consultation usually involves analyzing the needs of computer users and their problems, and providing the best solution. Units classified in this subclass may provide system hardware and software components as part of an integrated service or these components

may be provided by third parties or vendors. Units classified in this subclass generally install systems and train and support system users. This includes providing management and operation of the client's computer system and/or data processing facilities at the client's premises, as well as related support services. Similar activities carried out by sales units of computer companies are included in group 47411; and

- xv. Information Technology Activities and Other Computer Services, includes information technology activities and other computer services related to activities that have not been classified elsewhere, such as computer damage recovery, personal computer setup (setting up) and software installation. This includes incident management and digital forensics activities. This group includes various computer-related businesses that are not included in class 6201-6202.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Based on the Register of Shareholders of LINK reaching 5% or more as of 31 March 2022 issued by PT Sharestar Indonesia, as LINK's Securities Administration Bureau, LINK's capital structure and shareholder composition are as follows:

Shareholders	Nominal Value IDR100 per share		
	Total Share	Nominal Value (IDR)	%
Authorized Capital	8,040,000,000	804,000,000,000	
Issued and Paid-Up Capital			
- PT First Media Tbk.	798.969.286	79.896.928.600	27.90
- Asia Link Dewa Pte. Ltd.	1,017,766,198	101,776,619,800	35.55
- Public	934,845,500	93,484,550,000	32.65
- Treasury Stock	111,614,500	11,161,450,000	3.90
Total Issued and Paid-Up Capital	2,863,195,484	286,319,548,400	100
Total Shares in Portfolio	5,176,804,516	517,680,451,600	100

Management and Supervision

Based on the Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 22 dated 12 June 2020, made before Rini Yulianti, S.H., M.Kn., Notary in East Jakarta, which has been notified to the Minister of Law and Human Rights as stated in the Letter of Acceptance of Notification of Changes in Company Data No. AHU-AH.01.03-0249051 dated 16 June 2020 and registered in the Company Register under No. AHU-0094335.AH.01.11.In 2020 dated 16 June 2020, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of LINK is as follows:

Board of Directors

President Director	:	Marlo Budiman
Director	:	Henry Jani Liando
Director	:	Wonbae Lee
Director	:	Andy Nugroho Purwohardono

Director : Victor Indajang

Board of Commissioners

President Commissioner : Jonathan Limbong Parapak
(Independent)

Independent Commissioner : Alexander S Rusli

Commissioner : Edward Daniel Horowitz

Commissioner : Sigit Prasetya

Commissioner : Suvir Varma

III. EXPLANATION, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR THE PLAN OF THE TRANSACTION AND THE IMPACT OF THE TRANSACTION

The growth of the digital industry is increasingly providing great hope for Indonesia. In 2019, the value of the digital economy in Indonesia reached US\$40 billion or equivalent to Rp560 trillion. The number of online trading transactions every month reaches Rp. 13 trillion. From a total online spending of US\$8 billion in 2017, increasing to US\$55 billion to US\$65 billion in 2020. When it comes to future business prospects, various experts already believe that the digital industry will become a new landscape in the business world. The growth of the digital industry is exponential every year in Indonesia, especially in the midst of the Covid-19 pandemic, people's lifestyles have completely changed and turned to digital means in their daily lives. The growth of the digital industry is becoming increasingly aggressive in Indonesia and has become the largest economic pillar. The commercial route through the digital system becomes a new horizon to recover from the economic downturn.

Currently, the Company has a subsidiary which is engaged in media business, content creation, and digital television broadcasting. These business fields are in line with the growth trend of the digital industry, therefore the Company will continue to focus on developing the business. On the other hand, there was a discontinuation of the use of radio bands for the operation of Packet-Switched-based Local Fixed Networks using the 2.3 GHz radio frequency band for the purposes of wireless broadband services (Wireless Broadband), which resulted in the Company recording continuous operating losses since 2018.

The Company received attractive offers from AII and XL, namely strategic investors who are interested in acquiring LINK as part of developing their telecommunication business in Indonesia. Considering that XL is one of the leading telecommunications operators in Indonesia, the Company believes that the acquisition of LINK by XL and AII will strengthen LINK's position in complementing the ecosystem of the telecommunications industry in Indonesia.

Furthermore, part of the funds obtained by the Company from the implementation of the Proposed Transaction will also be used to repay the loan facilities that have been received by the Company, thereby reducing the Company's debt burden.

Based on the considerations above and with the Company's need for additional investment for digital business development as described above, the Company intends to sell all of its LINK shares to AII and XL.

The following is the impact of the transaction on the Company's financial condition:

Proforma of the Company's Balance Sheet as of December 31, 2021 (in million IDR)

Description	Before Transaction	Adjustment	After Transaction
Assets			
Current Assets			
Cash and Cash Equivalents	76,444	527,976	604,420
Trade Receivables			
Third Parties	31,043	--	31,043
Other Current Financial Assets	30,356	--	30,356
Prepaid Taxes	4,634	--	4,634
Prepaid Expenses	105	22,218	22,323
Total Current Assets	142,582	550,194	692,776
Non-Current Assets			
Other Non-Current Financial Assets	408,295	--	408,295
Investment in Associates	3,835,053	(3,835,053)	--
Property and Equipment	25,451	--	25,451
Intangible Assets	8	--	8
Advances	45,393	--	45,393
Deferred Tax Assets	11,003	--	11,003
Other Non-Current Assets	14,889	--	14,889
Non-Trade Receivables from Related Parties	45,844	--	45,844
Tax Amnesty Assets	56,704	--	56,704
Total Non-Current Assets	4,442,640	(3,835,053)	607,587
Total Assets	4,585,222	(3,284,859)	1,300,363
Liabilities			
Current Liabilities			
Trade Payables			
Third Parties	1,503,870	(408,711)	1,095,159
Related Parties	65,337	(50,966)	14,371
Accrued Expenses	46,427	(2,229)	44,198
Taxes Payable	33,444	(33,444)	--
Short-Term Employee Benefit Liabilities	1,454	--	1,454
Current Portion of Long-Term Debts:			
Borrowing from Banks and Other Financial Institutions	1,308,092	(1,308,092)	--
Finance Lease Payables	117	(117)	--
Other Current Financial Liabilities	1,251,902	(1,231,027)	20,875
Short-Term Loan	135,000	(135,000)	--
Other Current Liabilities	58,711	--	58,711
Total Current Liabilities	4,404,354	(3,169,586)	1,234,768
Non-Current Liabilities			
Long-Term Borrowing from Banks and Other Financial Institutions	81,000	(81,000)	--
Finance Lease Payables	14,712	(14,712)	--
Other Non-Current Financial Liabilities	15,949	(4,220)	11,729
Long-Term Employee Benefit Liabilities	24,485	--	24,485
Deferred Tax Liabilities	14,330	--	14,330
Total Non-Current Liabilities	150,476	(99,932)	50,544
Total Liabilities	4,554,830	(3,269,518)	1,285,312

Proforma of the Company's Balance Sheet as of December 31, 2021 (in million IDR) – continue

Description	Before Transaction	Adjustment	After Transaction
Equity			
Share Capital	871,084	--	871,084
Additional Paid in Capital - Net	(47,723)	--	(47,723)
Other Equity Components	143,988	--	143,988
Other Comprehensive Income	320,118	--	320,118
Deficit	(395,234)	(15,341)	(410,575)
Total	892,233	(15,341)	876,892
Non-Controlling Interests	(861,841)	--	(861,841)
Total Equity	30,392	(15,341)	15,051
Total Liabilities and Equity	4,585,222	(3,284,859)	1,300,363

Proforma Profit (Loss) of the Company as of December 31, 2021 (in million IDR)

Description	Before Transaction	Adjustment	After Transaction
Revenues	151,800	--	151,800
Cost of Services	(86,935)	--	(86,935)
Gross Profit	64,865	--	64,865
Selling Expenses	(22,763)	--	(22,763)
General and Administrative Expenses	(71,196)	--	(71,196)
Depreciation and Amortization Expenses	(40,941)	--	(40,941)
Impairment Loss of Investment in Associates	(1,948,688)	--	(1,948,688)
Impairment Loss of Other Non-Current Assets	(283,034)	--	(283,034)
Gain on Foreign Exchange – Net	177	--	177
Gain on Disposal of Property and Equipment – Net	182,322	--	182,322
Others - Net	795,146	(15,341)	779,805
Operating Loss	(1,324,112)	(15,341)	(1,339,453)
Finance Costs	(199,379)	--	(199,379)
Finance Income	1,092	--	1,092
Equity in Net Profit of Associates	257,102	--	257,102
Loss Before Income Tax	(1,265,297)	(15,341)	(1,280,638)
Income Tax Expenses	(567)	--	(567)
Loss For The Year	(1,265,864)	(15,341)	(1,281,205)

The Company is in view that the Proposed Transaction will strengthen the Company's financial structure and its business so that it can focus more on developing the media business and creating content.

IV. SUMMARY OF INDEPENDENT APPRAISER'S OPINION

The following is summary of the Independent Appraiser's Opinion prepared by KJPP as stated in report No. 00043/2.0042-00/BS/06/0405/1/IV/2022 dated 18 April 2022.

1. Object of Appraisal

798,969,286 (seven hundred ninety eight million nine hundred sixty nine thousand two hundred eighty six) shares in LINK owned by the Company representing 29.04% (twenty nine point zero four percent) of all issued shares and fully paid in LINK.

2. Purpose of Assessment

The purpose and objective of this assessment is to provide a market value opinion on the Company's 29.04% share ownership in LINK which has investments in FMTV, ISOL, and LNGS which will be used for the divestment interest.

3. Assumptions and Limiting Conditions

The appraisal and appraisal report are subject to the following limiting conditions:

- a. The data and information provided by the Assignor is considered true and reliable, including information about that the asset or liability that is the object of the appraisal is not being or has been assessed by another Public Appraiser for the purposes, objectives, users of the report and the same or adjacent appraisal date (in a period of not more than two months), in accordance with a written statement in the form of a representation letter made by the Assignor;
- b. Information provided by other parties to KJPP as stated in the assessment report is considered appropriate and reliable, but KJPP is not responsible if it turns out that the information provided is proven not to be in accordance with the real thing. Information stated without mentioning the source is the result of our review of existing data, examination of documents or information from authorized government agencies. The responsibility to double-check the correctness of the information rests entirely with the client.
- c. This report is presented only for the Purpose and Objectives in accordance with the Scope of Assignment listed in this Assessment Report.
- d. KJPP does not allow the use of all, part or as a reference of this Assessment Report, whether for circulars, statements, references or published in any form without written permission from KJPP.
- e. KJPP has no responsibility to third parties, as long as it does not deviate from the applicable laws and regulations.
- f. The values listed in this report as well as any other values in the Report that are part of the assets being assessed are only valid in accordance with the intent and purpose of the valuation. The values used in this appraisal report may not be used for other valuation purposes which may result in errors.
- g. This Assessment Report is a non-disclaimer opinion.
- h. The financial projections used in this Assessment Report have been adjusted to reflect the fairness of the financial projections made by management with their fiduciary duty.
- i. KJPP is responsible for the implementation of the assessment and fairness of financial projections.
- j. The appraiser is not obliged to give testimony or appear in court because this report is related to the occurrence of a dispute over the said asset, without a prior written agreement.

4. Approach and Assessment Method

The assessment process is carried out by applying generally accepted methods of assessment in accordance with POJK No. 35/2020. In accordance with the scope of the Assessment, for LINK, FMTV, and ISOL we use the Revenue Approach and the Market Approach, while for LNGS we only use the Market Approach because these companies have no operational activities. The details of the approach used are as follows:

- a. The Income Approach using the Discounted Cash Flow method is most appropriate if the amount of income that can be obtained by the company in the future can be estimated quite convincingly. After studying the characteristics of the business activities of LINK, FMTV, and ISOL such as historical financial performance, existing operational conditions, financial projections submitted by management, we believe that this approach can be used in the valuation of LINK, FMTV, and ISOL shares, where the method to be used is DCF with free cash flow model for companies (Free Cash Flow to Firm/ FCFF).
- b. The Market Approach using the Guideline Publicly Traded Company (GPTC) method is most appropriate if there are companies that are commensurate and comparable to the companies to be assessed. Therefore this approach can be used in stock valuation of LINK, FMTV, ISOL and LNGS.

Furthermore, we reconcile the value indications obtained from the two approaches with the appropriate weighting to get the Market Value.

5. Assessment Conclusion

Indication of the Market Value of ownership of 29.04% shares or 798,969,286 shares of the Company's ownership in LINK as of 31 December 2021 is IDR 3,789,229,000,000,- (Three Trillion Seven Hundred Eighty Nine Billion Two Hundred Twenty Nine Million Indonesia Rupiah) or IDR4,743 (Four Thousand Seven Hundred and forty-three Indonesia Rupiah) per share.

V. SUMMARY OF INDEPENDENT FAIRNESS OPINION

The following is summary of the Fairness Opinion Report on the proposed sale and purchase of 29.04% of the Company's LINK shares prepared by KJPP as stated in report No. 00048/2.0042-00/BS/06/0405/1/IV/2022 dated 21 April 2022.

1. Identity of Parties

- a. the Company is the owner of 29.04% shares in LINK, which acts as Seller;
- b. XL is a prospective purchaser of 8.80% shares in LINK from the Company; and
- c. All is a prospective purchaser of 20.24% shares in LINK from the Company.

2. Assessment Object
Object of the Proposed Transaction in the preparation of this fairness opinion report is the sale of 29.04% of LINK's shares or 798,969,286 shares owned by the Company to AII and XL ("**Object of Sale and Purchase**").
3. Purpose of Assessment
This Fairness Opinion Report aims to examine the fairness of the Proposed Transaction related to POJK No. 17/2020.
4. Assumption and Limitation
In preparing this independent opinion, we used several assumptions, among others:
 - KJPP assumes that since the Proposed Transaction until the issuance of this fairness opinion, there has not been any change that will materially affect the Proposed Transaction;
 - KJPP assumes that the Company complies with all regulations set by the government, especially those related to the Company's operations, both in the past and in the future;
 - KJPP assumes that the legality owned by the Company has no legal problems or other problems both before and after the Proposed Transaction;
 - KJPP assumes that the Company has and will fulfill obligations relating to taxation, levies and other levies in accordance with applicable regulations;
 - KJPP has reviewed the documents used in the assessment process;
 - This Fairness Opinion Report is a non-disclaimer opinion;
 - Fairness opinion is a report that is open to the public unless there is confidential information, which may affect the Company's operations;
 - KJPP is responsible for the fairness opinion and the conclusion of the fairness opinion;
 - KJPP has obtained information on the terms and conditions in the agreements related to the Proposed Transaction from the Company;
 - The report is prepared only for the purposes and objectives as stated in the report. We are not responsible to any other party other than the said Assignor. Other parties who use this report are responsible for all risks that arise;
 - KJPP is not obliged to give testimony or appear before a court or government official if this is not related to the aims and objectives of this report and is outside the scope of the assignment.
5. Approach and Assessment Method
In assessing the fairness of the Proposed Transaction, we conduct an analysis with the following stages:
 - Analysis of the Proposed Transaction which includes identification and relationship between the parties involved in the Proposed Transaction, analysis of the agreements and requirements in the Proposed Transaction, analysis of the benefits and risks of the Proposed Transaction.
 - Qualitative analysis of the Proposed Transaction which includes the history of the Company and the Company's business activities, industry analysis, operational analysis and prospects of the Company, analysis of the reasons for conducting the Proposed Transaction, advantages and disadvantages of the Proposed Transaction.
 - Quantitative analysis of the Proposed Transaction which includes analysis of the Company's historical financial statements, analysis of financial ratios, analysis of financial projections, financial analysis before and after the Proposed Transaction, and analysis of added value.
 - Analysis of the fairness of the Proposed Transaction.

6. Fairness Opinion Analysis on the Proposed Transaction

- The Proposed Transaction is not an affiliated transaction because there is no affiliation between the transacting parties. However, the Proposed Transaction is a material transaction, where the comparison between the value of the Proposed Transaction and the value of the Company's equity is 12,618.63% and this value is more than 20% of the Company's equity, so according to POJK 17/2020 the Proposed Transaction is a Material Transaction.
- Based on the Sale and Purchase Agreement and the terms above, there are no special requirements that will harm the transacting parties so that the conditions in the Proposed Transaction are reasonable.
- Based on the general description of the Technology, Media and Telecommunications (TMT) industry, it is estimated that this industry has good prospects in the future. Seeing these prospects makes the Company focus more on developing the TMT business, especially in the fields of telecommunications, media, content creation and digital television broadcasting.
- The benefits of the Proposed Transaction are that the Company can improve its financial condition and focus on developing the Company's digital business in line with the increasing need for digital communication media. The risk of the Proposed Transaction is not achieving the expected results, this risk is related to the achievement of the Company's performance in running its business.
- The reason for carrying out the Proposed Transaction is that the Company needs additional investment to focus on developing its business in the media, content creation and digital television broadcasting.
- The advantage of the Transaction is that the Company can pay off debts, loans and other obligations of the Company which have an impact on improving the Company's financial condition, so that in the future the Company can develop the media business, content creation, and digital television. The disadvantage of the Transaction is that the Company will not receive dividend income and additional investment on the results of the associated company's operating profits.
- Based on the Company's financial projections, it is estimated that the Company will be able to generate revenue with positive growth. Thus, the Proposed Transaction carried out by the Company is reasonable.
- Based on the financial statements before and after the Proposed Transaction, it is known that the Proposed Transaction increases the Company's liquidity ratio and reduces the solvency ratio.
- By comparing the net profit without the Proposed Transaction and with the Proposed Transaction, it is known that the net profit with the Proposed Transaction is higher than without the Proposed Transaction.

Referring to the comparison of the Proposed Transaction Value with the Market Value, the Proposed Transaction price is 1.21% above the market value, and is within the limit of $\pm 7.5\%$, then the price determined is reasonable.

7. Conclusion of Fairness Opinion on the Proposed Transaction

Based on the fairness opinion analysis above, KJPP is of the opinion that the Proposed Transaction is REASONABLE.

VI. GMS

Referring to Article 14 point c of POJK No. 17/2020, the Company will seek approval from the Independent Shareholders of the Company in connection with the Proposed Transaction ("**Independent GMS**"), where the announcement of the Independent GMS has been announced along with the date of this Information Disclosure.

GMS which is an Independent GMS will be held on:

Day/Date : Monday, 6 June 2022
Time : 14.00 Western Indonesia Time – finish
Venue : Monas Room, Aryaduta Hotel, Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.44-48, Gambir, Jakarta 10110

GMS Agenda:

Approval for carrying out the proposed transfer of 798,969,286 (seven hundred ninety eight million nine hundred sixty nine thousand two hundred and eighty six) shares owned by the Company in PT Link Net Tbk ("LINK") which represents 29.04% (twenty nine point zero four percent) of all issued and fully paid shares in LINK ("Proposed Transaction") which is a Material Transaction as referred to in OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities, as well as giving approval, ratification, and/or ratification of the actions and/or plans of the Company and the actions of the Board of Directors of the Company in relation to the Proposed Transaction.

Based on Article 44 POJK No. 15/2020, an independent GMS can be held with the following conditions:

1. The Independent GMS was attended by more than $\frac{1}{2}$ of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders of the Company and approved by more than $\frac{1}{2}$ of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders of the Company;
2. In the event that the quorum of attendance at the first Independent GMS above is not achieved, the second Independent GMS may be held if the Independent GMS is attended by more than $\frac{1}{2}$ of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders of the Company and approved by more than $\frac{1}{2}$ of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders of the Company who were present at the second Independent GMS;
3. In the event that the quorum of attendance at the second Independent GMS above is not achieved, then the third Independent GMS may be held provided that the quorum of attendance is determined by the OJK and the quorum of decisions at this third GMS is if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ of the total shares with rights. valid votes owned by the Independent Shareholders of the Company who are present at the third Independent GMS.

VII. INDEPENDENT PARTIES

Independent parties appointed by the Company to assist the Company:

1. **Makes & Partners Law Firm**, legal consultant appointed by the Company to assist the Company in preparing Information Disclosure in connection with the Proposed Transaction.
2. **Public Accountant Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partners (RSM Indonesia)**, public accountant appointed to assist the Company in the Company's Financial Statement in connection with the Proposed Transaction.
3. **Doli Siregar & Rekan**, public appraisal office appointed by the Company to provide independent appraiser opinion in connection with the Proposed Transaction.

VIII. STATEMENTS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Directors states that the Transaction is not an Affiliated Transaction as referred to in POJK No. 42/2020.

The Board of Commissioners and the Board of Directors declare that the Transaction does not contain a Conflict of Interest as referred to in POJK No. 42/2020.

The information presented in this Information Disclosure has been approved by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors, and the Company's Board of Commissioners and Board of Directors are responsible for the accuracy of the information. The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company declare that all material information presented in this Information Disclosure is true and can be accounted for and there is no other information that has not been disclosed that may cause the information presented in this Information Disclosure to be incorrect or misleading.

IX. ADDITIONAL INFORMATION

To obtain further information on the proposed Transaction, the Company's Shareholder may contact the Company at the following correspondence address :

PT First Media Tbk.

Head Office:

BeritaSatu Plaza 4th Floor, Suite 401
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35 - 36, Jakarta 12950
Telephone: (021) 5278811
Facsimile: (021) 5278833
Website: www.firstmedia.co.id
Email: corporate.secretary@firstmedia.com

Attn.: *Corporate Secretary*

Jakarta, 28 April 2022
Board of Directors of PT First Media Tbk